

**ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK HOTEL TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Pada Dinas Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2013-
2017)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

Oleh

**HAMSIAH
NPM.1551010055
Jurusan:Ekonomi Syariah**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H/2019 M**

**ANALISIS KONTRIBUTSI PAJAK HOTEL TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Pada Dinas Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
Tahun 2013-2017)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

Oleh :

**HAMSIAH
NPM.1551010055
Jurusan:Ekonomi Syari'ah**

**Pembimbing I : Dr. Erike Anggraeni, ME,E.Sy
Pembimbing II : Okta Supriyaningsih,S.E,M.E.Sy**

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN LAMPUNG

1441 H/2019 M

ABSTRAK

Kota Bandar Lampung sebagai Ibu Kota Provinsi Lampung memiliki banyak potensi yang apabila dikembangkan dapat memajukan pembangunan baik infrastruktur maupun sumber daya manusia. Letak Kota Bandar Lampung yang berada di jalur trans antar wilayah di provinsi Lampung, menjadi sangat strategis untuk usaha akomodasi perhotelan bagi Kota Bandar Lampung.

Rumusan masalah yang diangkat adalah (1) Bagaimana kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung ?, (2) Bagaimana Pandangan Ekonomi Islam mengenai Pajak Hotel di Kota Bandar Lampung?, Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui Seberapa besar kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah, (2) Untuk mengetahui Bagaimana pandangan Islam tentang pajak hotel di Kota Bandar Lampung

Penelitian ini dilakukan di BPPRD di Kota Bandar Lampung. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak hotel terhadap PAD di Kota Bandar Lampung. Pendekatan Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kuantitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi dan wawancara. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data target dan realisasi penerimaan pendapatan daerah, target dan realisasi pajak hotel Kota Bandar Lampung dari tahun 2013– 2017.

Penelitian menunjukkan penerimaan pajak hotel di Kota Bandar Lampung tidak mencapai target disetiap tahunnya, sedangkan penerimaan dan kontribusi pajak hotel setelah dilakukan uji efektivitas dan analisis kontribusi pajak hotel di Kota Bandar Lampung selama tahun 2013 – 2017 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Sehingga kontribusi jumlah penerimaan pajak hotel di Kota Bandar Lampung 2013-2017 terhadap PAD dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajak hotel dapat dikatakan sangat kurang efektif, karena nilai yang didapat dari hasil perhitungan efektifitas kontribusi masuk dalam nilai di antara 0,00% - 10% atau kriteria sangat kurang efektif masih tergolong kurang setiap tahunnya, hal ini mempengaruhi jumlah PAD yang diterima. Ketidak capaian target hotel di setiap tahunnya disebabkan oleh masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, karena itu diperlukan sosialisasi kepada wajib pajak, dan perlu diberikan sanksi bagi wajib pajak yang telat membayar pajaknya.

Kata Kunci : Kontribusi Pajak, Pajak Hotel, PAD, Efektifitas Pajak



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK HOTEL
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA
BANDAR LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM (Studi Pada Dinas Badan
Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah)**

**Nama Mahasiswa : Hamsiah
NPM : 1551010055
Program Studi : Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Erike Anggraeni, ME, E.Sy
NIP. 198208032011012009**

Okta Supriyaningsih, S.E, M.E.Sy

Ketua Jurusan

**Madnasir, S.E., M.S.I
NIP.197504242002121001**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Dinas Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2013-2017)**. Disusun oleh **HAMSI AH, NPM : 1551010055**, Program Studi : Ekonomi Syari'ah, Telah di Ujikan dalam sidang Munasqosyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Selasa, 27 Agustus 2019.

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : **Madnasir, S.E., M.S.I**

(.....)

Penguji 1 : **A. Zuliansyah, S.Si., MM**

(.....)

Penguji 2 : **Okta Suprianingsih, S.E., M.E.Sy**

(.....)

Sekretaris : **Iva Faizah, M.E**

(.....)

**Dekan,
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam**



Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I

NIP. 198008012003121001

MOTTO

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ

اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدَرًا ﴿٣﴾

Artinya : Dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. dan Barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)Nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah Mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.

(Q.s : Ath Thalaq : 3)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan dan saya dedikasikan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan terimakasih saya yang mendalam kepada:

1. Kedua Orang Tuaku tercinta, Ayah Darmawan Abdul Roni dan Ibu Emmasuri, serta Kakak-Kakakku Evi Niswati, Maryana, Siti Mariyam terimakasih atas cinta, kasih sayang, pengorbanan, dukungan, motivasi serta do'a kalian yang selalu membangkitkan dan menguatkan ku disetiap waktu ku menuntut ilmu. Semoga kelak penulis menjadi seorang anak yang dapat menjadi suri tauladan dan menjadi seorang hamba yang sholehah, sukses di dunia dan akhirat.
2. Bapak/ibu dosen yang selama ini telah menuntunku ke jalan yang lurus, memberikan ilmunya kepadaku dengan rasa tulus. Engkaulah sang pejuang sejati.
3. Teman-teman seperjuangan angkatan 2015 UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Syariah, semoga kita dapat menjadi generasi yang dapat mengamalkan ilmunya dengan penuh pengabdian untuk masyarakat. Terkhusus almamaterku UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan pengalaman yang sangat berharga untuk membuka pintu dunia kehidupan.

RIWAYAT HIDUP

Hamsiah dilahirkan di Kota Bumi, pada tanggal 06 Maret 1996 yang merupakan anak ke empat dari empat bersaudara pasangan Bapak Darmawan Abdul Roni dan Ibu Emmasuri.

Riwayat pendidikan penulis:

1. Pendidikan Sekolah Dasar ditempuh di SD Negeri 02 Langkapura Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2009.
2. Melanjutkan pendidikan di SMP Al-Husna Bandar Lampung Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2012.
3. Pada tahun 2012 melanjutkan sekolah di SMA Negeri 16 Bandar Lampung Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2015.
4. Kemudian pada tahun 2015 meneruskan pendidikan S-1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Prodi Ekonomi Syariah.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya berupa ilmu pengetahuan, petunjuk dan kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul “Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Dinas Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Tahun 2013-2017) ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga keluarga, sahabat, serta para pengikut beliau.

Skripsi ini ditulis merupakan bagian dan persyaratan untuk menyelesaikan studi pendidikan program Strata Satu (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E) dalam bidang ilmu syariah.

Atas terselesaikannya skripsi ini tak lupa penulis mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaiannya. Secara rinci penulis ucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Madnasir, S.E.,M.S.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

3. Ibu Dr. Erike Anggraeni, ME.E.Sy selaku pembimbing I yang dengan tulus telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga penulisan ini dapat diselesaikan.
4. Okta Suprianingsih, S.E,M.E.Sy. selaku pembimbing II yang dengan tulus telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga penulisan ini dapat diselesaikan.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
6. Bapak Darmawan Abdul Roni dan Ibu Emmasuri selaku orang tua serta Kakak-Kakakku Evi Niswati, Maryana, Siti Mariyam dan seluruh keluargaku yang selalu memberikan dukungan dan motivasi, semoga Allah SWT selalu melimpahkan kebahagiaan kepada kalian. Aamiin.
7. Dinas Pariwisata, Dinas Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) dan seluruh Staf yang telah memberikan izin, informasi dan kerjasamanya dalam terlaksananya penelitian ini.
8. Sahabat-sahabat yang Aku Sayanggi Saputri Anggraini, Atik Mulyani ,Lamtiur Mayogi Rohana Pasaribu, Nike Yusnia, Adinda Zafira Ahadis, Siti Khotimah, Rina Tri Saputri, Agus Setia Pratama, Elvan Suhendra, Arif Hidayat, Shouful Wizan, Iqbal Nibros Qholbi, Angga Kharisma Akbar, yang selama ini menjadi teman tebaik dalam bertukar informasi, berbagai keluhan dan keceriaan, serta memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Semua teman-teman angkatan khususnya prodi Ekonomi Syariah kelas F angkatan 2015 dan teman-teman KKN 52 yang selalu memberikan semangat serta dukungannya dan teman seperjuangan skripsi sahabat Kultaku Haidy susanti, Indah Lestari, Ika Apriani, Lisa Oktaviani, dan Laras Puri Tama.
10. Sahabat-Sahabatku yang telah berkontribusi dalam berjalannya penelitianku Rya Fitriana Sari S.Sos, Saputri Anggraeni, Selviana Oktiani S.Kep, dan Nurhidayati
11. Perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah menyediakan referensi buku dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semua pihak yang tidak dapat namanya penulis sebutkan semuanya saya ucapkan terimakasih banyak semoga apa yang telah kalian berikan menjadi amal soleh dari Allah SWT dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi para akademisi dan pembaca. Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan waktu, dana, kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran guna melengkapi hasil penelitian ini

Akhirnya, penulis berharap hasil penelitian ini akan menjadi sambungan yang berarti dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu ke Islaman di abad modern ini.

Bandar Lampung, 18 April 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xii

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	4
C. Latar Belakang Masalah	5
D. Rumusan Masalah	14
E. Tujuan Penelitian.....	14
F. Manfaat Penelitian.....	15

BAB II LANDASAN TEORI	16
A. Pajak.....	16
1. Pajak Dalam Perspektif Ekonomi Islam	16
a. Asas Teori Pajak Menurut Syariat	18
b. Prinsip Pendapatan Negara Menurut Sistem Ekonomi Islam	20
c. Tujuan Penggunaan Pajak Menurut Syariat Islam	21
d. Pendapatan Pada Masa Rasulullah Saw.....	21
e. Pendapatan Bahwa Boleh Melakukan Pemungutan Pajak Dalam Islam ..	25
2. Pajak Dalam Konsep Umum	26
a. Pengertian Pajak	26
b. Teori Penggunaan Pajak	28
c. Fungsi Pajak	29
d. Tarif Pajak.....	29
e. Macam-Macam Pajak.....	30
f. Sistem Pemungutan Pajak	32
g. Syarat Pemungutan Pajak	33
h. Asas Penggunaan Pajak	35
i. Hukum Pajak.....	36
B. Pajak Hotel	37
1. Pengertian Pajak Hotel	37
2. Objek Pajak Hotel	39

C. Pendapatan Asli Daerah	40
1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	40
2. Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah (PAD)	44
3. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah.....	44
4. Jenis Pajak.....	47
5. Dasar Pengenaan Pajak	51
D. Teori Kontribusi	52
1. Pengertian Kontribusi.....	52
2. Pengertian Efektifitas	54
E. Tinjauan Pustaka	55
F. Kerangka Pemikiran	58
G. Hipotesis.....	59
 BAB III METODE PENELITIAN.....	60
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	60
B. Populasi Dan Sampel.....	61
C. Sumber Data	62
D. Metode Pengumpulan Data	62
E. Metode Analisis Data	64
F. Variabel Penelitian	67
G. Definisi Operasional	67
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	70
A. Gambaran Umum Kota Bandar Lampung	70
1. Sejarah Kota Bandar Lampung.....	70
2. Sejarah Dinas Pendapatan Asli Daerah	73
a. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Asli Daerah	76
b. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Kebijakan Dinas Pendapatan	78
B. Hasil Penelitian	82
1. Pajak Hotel.....	82
2. Pendapatan Asli Daerah	87
C. Analisis Data	89
1. Analisis Uji Efektifitas Pajak Hotel	89
2. Analisis Kontribusi Pajak Hotel	92
D. Pembahasan.....	94
1. Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Asli Daerah Kota Bandar Lampung	95
2. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Pajak Hotel Di Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam.....	96
 BAB V PENUTUP.....	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran	101

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Pikir.....	59
------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Riset di Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung
2. Surat Riset di Dinas Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung
3. Surat Kesbangpol Kota Bandar Lampung
4. Surat Izin Penelitian dari UIN Raden Intan Lampung
5. Data Pendapatan Asli Daerah



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Jumlah Hotel Berbintang dan Hotel Non Bintang di Kota Bandar Lampung9

Tabel 2 Data Jumlah Tingkat Penghunian Kamar Hotel Berbintang dan Hotel Non Bintang di Kota Bandar Lampung9

Tabel 3 Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kota Bandar Lampung 12

Tabel 4 Tabel Kriteria Efektivitas Nilai Kontribusi..... 66

Tabel 5 Tabel Definisi Operasional 68

Tabel 6 Nama-Nama Wajib Pajak Hotel/Penginapan di Kota Bandar Lampung 83

Tabel 7 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kota Bandar Lampung..87

Tabel 8 Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung 88

Tabel 9 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kota Bandar Lampung..90

Tabel 10 Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Kota Bandar Lampung 91

Tabel 11 Hasil Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD 94

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis menguraikan pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu akan dijelaskan istilah dalam skripsi ini untuk menghindari kekeliruan bagi pembaca oleh karena itu, untuk menghindari kesalahan tersebut disini diperlukan adanya pembatasan terhadap arti kalimat dalam skripsi ini. Dengan harapan memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud. Adapun judul skripsi ini adalah **“ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”** untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami maksud dan tujuan serta ruang lingkup maka perlu adanya penegasan judul tersebut dengan uraian sebagai berikut :

1. **Analisis** adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab, musabab, dan duduk perkaranya), Salah satu bentuk analisis adalah merangkum sejumlah besar data yang masih mentah menjadi informasi yang dapat diinterpretasikan⁵⁷
2. **Kontribusi** adalah sumbangan atau uang iuran kepada organisasi atau perkumpulan.⁵⁸

⁵⁷ Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 58

⁵⁸Fajri, Em Zul dkk, *“Kamus Lengkap Bahasa Indonesia “*(Jakarta : Difa Publisher,2002).h.17

3. **Pajak Hotel** Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.⁵⁹ Hotel menurut Kurniawan adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola, dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. Jasa penunjang sebagaimana dimaksud sebelumnya adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.
4. **Pendapatan Asli Daerah (PAD)** PAD menurut Halim adalah “penerimaan yang diperoleh daerah yang berasal dari sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁶⁰ PAD merupakan pendapatan yang berasal dari pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh suatu daerah. Dalam otonomi daerah, suatu daerah dituntut untuk mencari cara yang dapat dimanfaatkan dengan baik guna meningkatkan PAD.
5. **Perspektif Ekonomi Islam**, kalimat ini terdiri dari dua istilah yaitu: prespektif dan ekonomi Islam. Prespektif adalah sudut pandang, Ekonomi Islam dalam bahasa Arab ia dinamakan *al-muamalah al-madiyah* yaitu aturan-aturan tentang pergaulan dan perhubungan manusia mengenai kebutuhan hidupnya. Lebih tepat lagi ia dinamakan *al-iqtishad*

⁵⁹Panca Kurniawan dan Agus Purwanto “*Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*” (Malang: Anggota IKAPI Jatim,2006),h.69

⁶⁰Abdul Halim “*Manajemen Keuangan Daerah*” (Yogyakarta: Unit Penerbit Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN,2004),h.96

yaitu artinya hemat atau sederhana, karena ia mengatur soal-soal penghidupan manusia dengan sehemat-hematnya dan secermat-cermatnya. Prespektif ekonomi Islam adalah sudut pandang aturan-aturan tentang pergaulan dan perhubungan manusia mengenai kebutuhan hidupnya soal-soal penghidupan manusia dengan sehemat-hematnya dan secermat-cermatnya.

Dalam skripsi ini yang dimaksud prespektif ekonomi Islam adalah pandangan Islam mengenai sudut pandang pajak, serta aturan-aturan pemungutan pajak serta realisasi dari pemungutan pajak itu sendiri bertujuan terhadap kesejahteraan manusia melalui pendapatan asli daerah yang seirama dengan *maqasid* (tujuan-tujuan syari'ah).

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diperjelas kembali bahwa yang dimaksud dalam pembahasan skripsi ini adalah suatu penelitian ilmiah yang berdasarkan pada firman Allah SWT, Sunah Rasul serta ijtihad para ulama tentang kegiatan ekonomi. Dimana pajak hotel merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang menyumbang pendapatan untuk pemerintah. Hal ini terkait bahwa pendapatan pajak hotel berkontribusi terhadap pendapatan Asli Daerah, Kota Bandar Lampung, Maka dari itu penulis akan membahas kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah kota bandar lampung.

B. Alasan Memilih Judul

Dalam suatu penelitian ilmiah, alasan memilih judul merupakan faktor yang penting. Dengan kata lain merupakan faktor yang menyebabkan judul itu terpilih. Adapun alasan tertariknya peneliti untuk membahas judul Analisis kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan kota bandar Bandar

Lampung dalam perspektif ekonomi islam adalah dilatar belakangi oleh sebab-sebab berikut ini :

1) Alasan objektif

- a. Pajak adalah kontribusi wajib oleh orang pribadi atau badan yang wewenang pemungutannya adalah pada Pemerintah Daerah, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Melihat banyaknya sumber penerimaan yang berasal dari pajak hotel, maka diharapkan Pemerintah memiliki peluang untuk dapat meningkatkan PAD melalui pajak hotel, sehingga kontribusi atau sumbangan yang diberikan oleh pajak hotel terhadap PAD dinilai besar dan cukup dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan pembangunan.
- b. Pemerintah harus mampu mengelola serta memaksimalkan potensi yang ada pada daerah demi kelangsungan dan kemajuan daerah. Bisa didapatkan salah satunya dari sumber penerimaan yang berasal dari pajak hotel.

2) Alasan subjektif

- a. Pokok bahasan skripsi ini sesuai berdasarkan jurusan yang sedang peneliti dalam yaitu, program Ekonomi Syariah disamping itu untuk literatur penulis, menggunakan literatur buku yang tersedia di perpustakaan UIN Raden Intan Lampung selain itu penulis juga menggunakan jurnal, artikel, dan data yang diperlukan.

- b. Tempat penelitian yang terjangkau dan selama ini telah peneliti amati, tersedia faktor pendukung serta sumber data, informasi, literatur dan waktu yang cukup yang dapat menunjang dalam pelaksanaan penelitian.

C. Latar Belakang

Pajak dalam kehidupan kaum muslimin masuk dalam ranah ekonomi Islam, dimana islam memandang pajak, menurut Yusuf Qardawi pajak merupakan kewajiban yang ditetapkan wajib pajak yang harus disetorkan terhadap negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara dan hasilnya untuk membiayai keperluan umum, disatu pihak untuk merealisasikan sebagai tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.⁶¹ Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat (9):(29):

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya : "Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka

⁶¹ Gustami, *Pajak Menurut Syariah*, edisi Revisi, (jakarta:rajawali pers:2011), h.31

*membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”.*⁶²

Berdasarkan ayat diatas maka dapat dijelaskan bahwa *Jizyah* adalah salah satu sumber utama dalam anggaran negara Islam. Pajak ini berkisar antara 48 dan 12 dirham untuk satu orang, yang diambil dari orang-orang yahudi dan Nasrani dan orang-orang yang memiliki status hukum yang sama dengan mereka. *Jizyah* ini diwajibkan atas laki-laki, baligh, sehat badan dan akal dengan syarat dia mempunyai harta yang dipakai untuk membayar atas apa yang diwajibkan atasnya dan yang dibebaskan darinya adalah wanita, anak-anak dan orang-orang tua, Orang buta, yang lemah (untuk berperan) dan juga tidak diwajibkan untuk membayar, kecuali apabila mereka kaya. dan juga orang-orang fakir, miskin dan hamba-hamba sahaya dan para rahib yang menjauhkan diri dari manusia.⁶³ Secara umum sumber pemasukan Negara dalam perspektif ekonomi Islam adalah zakat, *jizyah* (pajak perorangan), dan pendapatan lain yang bersumber dari usaha yang halal. Dengan demikian, perintah membayar pajak-pajak tersebut dalam Islam merupakan tindakan religius yang didorong untuk menciptakan kesejahteraan kepada seluruh lapisan masyarakat baik muslim maupun non muslim

Pajak merupakan kewajiban tambahan setelah zakat yang merupakan sebuah kewajiban lain atas harta bagi umat muslim dimana manfaat dari hasil pemungutan pajak tersebut digunakan untuk pembiayaan

⁶²Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya (Bandung Pt. Sygma Examedia Arkanleema, 2013) Qs.At-Taubah (9) : 29 h.193

⁶³Muhammad Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Qs. At-Taubah (9) : 25

pembangunan perekonomian yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Dalam pemungutan pajak, Islam memiliki prinsip keadilan dimana prinsip keadilan merupakan pilar penting dalam ekonomi islam untuk menghalangi timbulnya tidak keseimbangan distribusi kekayaan yang dapat merugikan salah satu pihak dan juga memicu salah satu konflik individu maupun sosial yang mempengaruhi pembangunan ekonomi suatu wilayah.⁶⁴

Guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan rakyat serta melakukan pembangunan, maka setiap daerah memiliki sumber-sumber pendapatan atau penerimaan untuk pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Salah satu sumber penerimaan daerah dapat diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD terdiri dari beberapa komponen, yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Berdasarkan sumber pendapatan, pajak daerah dipandang sebagai salah satu alternatif penting dalam rangka mempercepat pembangunan daerah serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.⁶⁵

Salah satu sumber pungutan pajak daerah adalah pajak hotel. Secara umum pengertian Hotel adalah bangunan khusus yang disediakan untuk

⁶⁴ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada aktivitas ekonomi*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo, 2015), h.212.

⁶⁵ Susilowati, D., Sri, M., & Suliswanto, W. Manusia, *Utang Luar Negeri Dan Kemiskinan (Kajian Teoritis Di Indonesia)*. *Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Utang Luar Negeri Dan Kemiskinan (Kajian Teoritis Di Indonesia (2015),)*, h.89–106

menginap atau beristirahat bagi pengunjung. Kemudian dari hasil pelayanan dipungut bayaran yang dimasukkan menjadi pajak sebagai pemasukan bagi daerah, hal tersebut telah diatur dalam UU No.34 tahun 2000. Sektor Pariwisata juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi PAD melalui pajak hotel.

Kota Bandar Lampung sebagai ibukota Provinsi Lampung memiliki banyak potensi yang apabila dikembangkan dapat memajukan pembangunan baik dari infrastruktur maupun sumber daya manusia. Letak Kota Bandar Lampung yang berada di jalur trans antar wilayah di provinsi Lampung, menjadi sangat strategis bagi Kota Bandar Lampung.⁶⁶ Sebagai kota persinggahan (transit) tidak salah jika kita menyebut Kota Bandar Lampung sebagai kota transit dikarenakan kalau kita melihat data bisnis akomodasi termasuk hotel dan penginapan, yang ada di Kota Bandar Lampung, jumlahnya cukup banyak. Ketersediaan hotel dan penginapan tersebut bukan tanpa alasan. Jika dilihat jumlah penginapan di Kota Bandar Lampung hampir mencapai 100 hotel bintang dan hotel non bintang mungkin tidak sebanyak di kota lainnya, oleh karena itu pemerintah daerah harus mampu memaksimalkan dari sektor industri perhotelan dalam rangka meningkatkan PAD Kota Bandar Lampung.

Tabel 1.
Jumlah Hotel Berbintang dan Hotel Non Bintang di Kota Bandar Lampung

No	Tahun	Hotel Bintang	Hotel Non Bintang	Jumlah
----	-------	---------------	-------------------	--------

⁶⁶BeritaKota Bandar Lampung , “Sebagai Kawasan Strategis yang Mensejahterakan Masyarakat”Bandar Lampung Creative City Forum.

1	2013	10	58	68
2	2014	10	59	69
3	2015	17	58	75
4	2016	24	70	94
5	2017	15	83	98

Sumber: Jumlah Hotel Berbintang dan Hotel Non Bintang di Bandar Lampung, Dinas Priwisata Kota Bandar Lampung tahun 2017

Bila dilihat dari tabel diatas jumlah hotel dari tahun 2013 sampai 2017 mengalami peningkatan, banyak faktor yang menyebabkan jumlah hotel mengalami peningkatan⁶⁷ Salah satunya disebabkan persaingan antar sesama hotel baik dari segi pelayanan dan sarana yang disediakan. Namun adanya persaingan hotel ini menyebabkan peningkatan mutu dari hotel-hotel yang ada di Bandar Lampung oleh sebab itu hotel-hotel yang memiliki kualitas mutu yang tinggi dapat mengembangkan hotelnya dan menarik banyak minat tamu untuk menginap dihotel tersebut. Dengan adanya peningkatan mutu pelayanan dan sarana di hotel menyebabkan kenaikan pada tarif penginapan dihotel tersebut, namun kenaikan tarif ini tidak mempengaruhi jumlah tamu yang menginap disebabkan sarana dan pelayanan yang didapatkan sesuai dengan apa yang mereka inginkan terlihat dari beberapa indikator, antara lain jumlah wisatawan dari tahun ke tahun meningkat serta tingkat hunian kamar yang selalu tumbuh positif dengan *trend* yang meningkat sejak tahun 2014.

Keberadaan Kota Bandar Lampung yang terletak di tengah-tengah Pulau Sumatra sebagai pusat pemerintahan, pusat hiburan dan juga pusat bisnis

⁶⁷Jumlah Hotel di Kota Bandar Lampung 2017, Dinas Priwisata kota Bandar Lampung.

sehingga banyak orang dari berbagai daerah datang ke Kota Bandar Lampung untuk melakukan berbagai kegiatan ekonomi. Hal ini berdampak jumlah wisatawan yang datang dari luar kota akan membutuhkan tempat beristirahat walau terkadang hanya beberapa jam beristirahat di hotel, akan tetapi akibatnya kebutuhan akan tempat beristirahat tersebut semakin tinggi. Kebutuhan peristirahatan tersebut terlihat dengan banyaknya tingkat penghunian kamar hotel.



No	Tahun	TPK Hotel	
		Bintang	Non Bintang
1.	2013	55,50 %	41,81%
2.	2014	54,20%	36,86%
3.	2015	45,42%	35,93%
4.	2016	51,18%	39,10%
5.	2017	66,36%	49,40%

Sumber: Jumlah Tingkat Penghunian Kamar Hotel di Bandar Lampung, Dinas Priwisata Kota Bandar Lampung tahun 2017

Pada tahun 2013 Tpk mencapai posisi hotel bintang 55,50%, dan Hotel Non Bintang 41,81% TPK hotel berbintang tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 54,20% dan non bintang 36,86% Kemudian dari tahun

2015-2017 Tpk Hotel Bintang dan Non Bintang terus mengalami peningkatan menjadi 66,36% dan non bintang 49,40%.⁶⁸

Dapat dilihat dari tingkat penghunian kamar dan jumlah tamu menginap di hotel dari tahun ke tahun selalu ramai pengunjung, ini dapat di isyaratkan menjadi salah satu pemicu peningkatan pendapatan asli daerah yang berupa pajak dari hotel itu sendiri. Peningkatan hunian kamar juga berbanding lurus terhadap, Jumlah tamu wisatawan yang cukup signifikan yang menginap di hotel bintang maupun non bintang di Kota Bandar Lampung, mendukung adanya peningkatan pajak hotel, yang kemudian akan memberikan pertambahan jumlah pajak hotel. Pajak hotel akan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung.

Tabel. 3
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kota Bandar Lampung Tahun 2013-2017

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI
1	2013	Rp. 15.000.000.160,00	Rp. 12.335.668.039,50
2	2014	Rp. 16.000.000.000,00	Rp. 16.020.176.880,00
3	2015	Rp. 20.000.000.000,00	Rp. 15.243.130.946,00
4	2016	Rp. 21.000.000.000,00	Rp. 18.586.994.392,00
5	2017	Rp. 22.000.000.000,00	Rp. 20.726.154.355,00

Sumber : Badan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung,2019

Berdasarkan **Tabel . 3** pajak hotel dari tahun 2013-2017 tidak dapat mencapai target dengan baik, jika kita melihat dari realisasi hotel

⁶⁸Perkembangan Tingkat Hunian Kamar desember 2017 Provinsi Lampung. Hal,2 Badan Pusat Statistik

penerimaannya cukup mengalami kenaikan yang fluktuatif dari tahun 2013-2017 di Kota Bandar Lampung.⁶⁹

Banyaknya jumlah kunjungan wisatawan yang menginap di hotel memberikan dampak pada peningkatan pajak, dan ini berpengaruh besar terhadap Kontribusi Pendapatan Asli Daerah yang berupa Pajak Daerah yang di dapat dari hotel. Hal inilah yang menyebabkan alasan peneliti fokus pada pajak hotel penulis ingin mengetahui kontribusi pajak hotel terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung tahun 2013-2017 (PAD)⁷⁰, merupakan salah satu kas daerah guna membiayai pembangunan daerah itu sendiri. PAD yang merupakan gambaran potensi keuangan daerah pada umumnya mengandalkan unsur pajak daerah dan retribusi daerah.⁷¹ Berkaitan dengan pendapatan asli daerah dari sektor Perhotelan maka Kota Bandar Lampung dapat menggali potensi sumber Pendapatan yang berupa Pajak Hotel. Oleh sebab itu pajak daerah harus dikelola secara profesional dan transparan dalam rangka optimalisasi dan usaha meningkatkan kontribusinya terhadap pendapatan daerah.

Kota Bandar Lampung mencoba Mengelola berbagai pajak daerah, salah satunya adalah pajak Hotel. Mengingat pajak Hotel merupakan salah satu penunjang PAD kota Bandar Lampung maka pemungutan pajak Hotel perlu dioptimalkan. Guna mengoptimalkan penerimaan sumber komponen pajak

⁶⁹ Sumber : “Badan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung”, 22 Mei 2019

⁷⁰ Dewi Oktavina, “Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Dalam Rangka Otonomi Daerah : Pendekatan Error Correction Model”, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 10 No. 2 Desember 2012, H. 88-89.

⁷¹ R. Agoes Kamaroellah, “ Analisis Kontribusi Penerimaan Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan, ” Jurnal Ekonomika, Vol. 4 No. 1 Juni 2011, h. 7.

daerah ini, tentunya perlu dilakukan perhitungan penerimaan pajak hotel pada Badan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah (*BPPRD*) secara cermat dan akurat yang akan bermuara kepada peningkatan realisasi PAD khususnya dari penerimaan pajak Hotel pada BPPRD di Kota Bandar Lampung.⁷²

Pemungutan pajak daerah merupakan perwujudan dari pengabdian dan juga peran wajib pajak untuk langsung bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan dan pembangunan daerah. Untuk memperlancar pembangunan daerah maka diperlukannya suatu dana yang berasal dari penerimaan daerah yaitu salah satunya dari pemungutan pajak dan retribusi daerah. Pemungutan pajak daerah merupakan perwujudan dari pengabdian dan juga peran wajib pajak untuk langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan dan pembangunan daerah.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung ?
2. Bagaimana Pandangan Ekonomi Islam mengenai Pajak Hotel di Kota Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian atau riset pada umumnya untuk menemukan, mengkaji dan mengembangkan ilmu pengetahuan, demikian dengan penelitian yang akan diungkapkan dalam skripsi ini juga mempunyai

⁷²Randy J.R.Walakandou,” *Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad)Di Kota Manado*”, Jurnal Emba Vol.1 No.3 Juni 2013, H.724.

tujuan tertentu. Adapun yang menjadi tujuan dalam pelaksanaan penelitian penulis ini adalah :

- a. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan
- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan islam tentang pajak hotel di Kota Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian merupakan dampak dari terapainya tujuan, serta untuk menjelaskan tentang manfaat dari penelitian yang dilakukan peneliti.⁷³ Manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian sejenis dimasa yang akan datang khususnya program studi Ekonomi Syariah bagaimana kontribusi pajak hotel dalam peningkatan PAD dan faktor-faktor penghambat dan pendorong pendapatan pajak hotel.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam hal pajak hotel kepada pemerintah dalam menjalankan dan meningkatkan pendapatan pajak hotel dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah sehingga nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak hotel. Menambah pengetahuan dan informasi tentang pengaruh pajak hotel dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah.

⁷³Ridwan. *Metode Dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 11

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pajak

1. Pajak dalam Perspektif Ekonomi Islam

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *Dharibah* yang artinya adalah mewajibkan, mendapatkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebankan dan lain-lain⁷⁴. *Dharibah* disebut beban karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebuah beban.

Dalam al-quran yang terdiri dari 30 juz, 74.499 kata atau 325.345 suku kata tidak ditemukan satu pun kata pajak, berbeda halnya dengan kata zakat yang terdapat 30 kali. Namun demikian dalam terjemahan al-quran terdapat 1 kali kata pajak, yaitu pada terjemahan Q.S At-Taubah ayat 29 yang berbunyi :

⁷⁴A.W. Munawwir, Kamus Al-Munawwir, (Surabaya: Pustaka Progresif,2012) h. 830

فَقَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا
تُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ
صَغِيرُونَ ﴿١٦﴾

Artinya : Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah[638] dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk.⁷⁵

Berdasarkan ayat di atas maka dapat dijelaskan bahwa, *Jizyah* ialah pajak per kepala yang dipungut oleh perintah islam dari orang-orang yang bukan islam, sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka. Salah satu sumber utama dalam anggaran negara Islam. Pajak ini berkisar antara 48 dan 12 dirham untuk satu orang, yang diambil dari orang-orang yahudi dan Nasrani dan orang-orang yang memiliki status hukum yang sama dengan mereka. *Jizyah* ini diwajibkan atas laki-laki, baligh, sehat badan dan akal dengan syarat dia mempunyai harta yang dipakai untuk membayar atas apa yang diwajibkan atasnya dan yang dibebaskan darinya adalah wanita, anak-anak dan orang-orang tua, Orang buta, yang lemah (untuk berperan) dan juga tidak diwajibkan untuk membayar, kecuali apabila mereka kaya. dan juga orang-orang

⁷⁵ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya (Bandung Pt. Sygma Examedia Arkanleema, 2013) Qs.At-Taubah (9) : 29 h.193

fakir, miskin dan hamba-hamba sahaya dan para rahib yang menjauhkan diri dari manusia.⁷⁶

Secara umum sumber pemasukan Negara dalam perspektif ekonomi Islam adalah zakat, *jizyah* (pajak perorangan), dan pendapatan lain yang bersumber dari usaha yang halal. Dengan demikian, perintah membayar pajak-pajak tersebut dalam Islam merupakan tindakan religius yang didorong untuk menciptakan kesejahteraan kepada seluruh lapisan masyarakat baik muslim maupun non muslim. Peranannya dalam system perekonomian serta aplikasinya di beberapa Negara muslim.⁷⁷

Pajak merupakan kewajiban tambahan setelah zakat yang merupakan sebuah kewajiban lain atas harta bagi umat muslim dimana manfaat dari hasil pemungutan pajak tersebut digunakan untuk pembiayaan pembangunan perekonomian yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan dan lain-lain.

Dalam pemungutan pajak, Islam memiliki prinsip keadilan dimana prinsip keadilan merupakan pilar penting dalam ekonomi islam untuk menghalangi timbulnya ketidakseimbangan distribusi kekayaan yang dapat merugikan salah satu pihak dan juga memicu salah satu konflik individu maupun sosial yang mempengaruhi pembangunan ekonomi suatu wilayah. Menurut Islam, Negara memiliki hak untuk

⁷⁶ Muhammad Quraish Sihab Tafsir Al-Misbah Qs.: At -Taubah (9):25

⁷⁷ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada aktivitas ekonomi*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo, 2015), h.212.

ikut campur dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu-individu, baik untuk mengawasi kegiatan maupun untuk mengatur atau melaksanakan beberapa macam kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh individu-individu.

a. Asas Teori Pajak Menurut Syariat Islam

Ada tiga ulama yang mendefinisikan tentang pajak yaitu Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *Fiqh Az-Zakah*, Gazy Inayah dalam kitabnya *Al-Iktishad al-islami az-Zakah wa ad-Dharibah* dan Abdul Qadim Zallum dalam kitabnya *Al-Amwal fi Daulah Al-Khilafah*. Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang harus disetorkan kepada Negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari Negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagai tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh Negara.

Gazi Inayah berpendapat pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan dialokasikan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah.

Abdul Qadim Zallum berpendapat pajak adalah harta yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada kaum muslim untuk membiayai

berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang atau harta.⁷⁸

Penulis lebih setuju dengan definisi yang dikemukakan oleh zallum karena dalam definisinya terdapat lima unsur pokok yang merupakan unsur penting dalam ketentuan pajak menurut syariat yaitu :

- 1) Diwajibkan oleh allah
- 2) Objeknya adalah harta (al-mall)
- 3) Subjeknya Kaum Mukmin yang kaya saja, dan tidak termasuk non Muslim
- 4) Tujuanya Hanya Untuk membiayai kaum muslim saja.
- 5) Diberlakukan hanya karena adanya kondisi darurat

b. Prinsip Pendapatan Negara Menurut Sistem Ekonomi Islam

Mengenai Pendapatan Negara Allah Swt. telah menggariskan secara tegas beberapa sumber primer yang boleh dipungut oleh Uliil Amri, misalnya : *Zakat* (Qs. At-Taubah [9] :103), *Jizyah* (Qs. At-Taubah [9]:29), *Fay'i* (Qs. Al-Hasyr [59]:6), *Ghanimah* (Qs.Al-Anfal [8]:41, *Kharaj* (Qs.Al-Hasyr [59]:7-10) Dan *Wakaf* (Qs. Al-Muzzammil [73]:20), disamping pendapatan lain (Sekunder) yang merupakan ijtihad para khalifah, berupa sitaan atau denda sebagai sanksi-sanksi atas pelanggaran hukum, seperti: *Ghulul*, Sogok hadiah/hibah, komisi, uang korupsi dan denda yang harus disetorkan kepada negara.

⁷⁸Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007),h.31-32

Dalam sistem Ekonomi Islam ada beberapa unsur dasar prinsip-prinsip penerimaan pemungutan negara menurut Sistem Ekonomi Islam, yaitu harus memenuhi empat Unsur :

- 1) Harus adanya nash (Al-Quran dan Hadis) yang memerintahkan setiap sumber pendapatan dan pemungutan.
- 2) Adanya pemisah sumber penerimaan kaum muslim dan non muslim.
- 3) Sistem pemungutan pajak harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan golongan makmur yang mempunyai kelebihan saja yang memikul beban utama (Pajak).
- 4) Adanya tuntutan kemaslahatan umum⁷⁹

c. Tujuan Penggunaan Pajak Menurut Syari'at

Tujuan pajak itu adalah untuk membiayai berbagai pos pengeluaran Negara, yang memang diwajibkan atas mereka, pada saat kondisi Baitul Mal kosong atau tidak mencukupi. Jadi ada tujuan yang mengikat dari dibolehkannya memungut pajak itu, yaitu pengeluaran yang memang sudah menjadi kewajiban kaum muslimin dan adanya suatu kondisi kekosongan kas Negara.

Menurut Zallum, ada 6 jenis pengeluaran yang biasa dibiayai oleh pajak antara lain pembiayaan jihad, pembiayaan untuk pengadaan dan pengembangan industri militer, pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pokok orang fakir, miskin dan ibnu sabil, pembiayaan

⁷⁹*ibid*, h.176

untuk gaji pegawai Negara, untuk kemaslahatan atau fasilitas umum serta untuk penanggulangan bencana

d. Pendapatan Pada Masa Rasulullah Saw.

Sebagai sebuah ajaran hidup yang lengkap, Islam memberikan petunjuk atas semua aktivitas manusia, termasuk ekonomi. Oleh karenanya tujuan diturunkannya syari'at Islam, yaitu untuk mencapai falah (kesejahteraan/keselamatan) baik dunia maupun akhirat.

Pada masa Islam, Pemerintah menggunakan biaya-biaya untuk melakukan pembangunan sebagai salah satu tanggung jawab terhadap masyarakat agar dapat terus merasa sejahtera. Terkait pembiayaan sektor publik oleh Negara, adapun sumber - sumber pendapatan Negara di zaman Rasulullah SAW, sebagai berikut:

1) Zakat

Zakat adalah sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan kepada pemerintah/pengurus kaum muslimin, untuk membiayai kebutuhan bersama terutama menyangkut pengembangan SDM. Pada periode Makkah zakat disyariatkan sebagai anjuran yang bersandar pada kesadaran pribadi Muslimin akan perlunya membentuk sebuah masyarakat atau umat yang berkeadilan dengan jalan membebaskan kemiskinan dan kekafiran lainnya. Sedangkan pada periode Madinah, pungutan zakat menjadi wajib dan diambil alih oleh pemerintah dengan menugaskan amil atau petugas pemungut.

2) *Kharaj*

Sumber pendapatan yang pertama kali diperkenalkan di zaman Rasulullah SAW, adalah kharaj. Kharaj adalah pajak terhadap tanah, atau di Indonesia setara dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perbedaan yang mendasar antara sistem PBB dengan sistem Kharaj adalah bahwa Kharaj ditentukan berdasarkan tingkat produktivitas dari tanah (*Land Productivity*) bukan berdasarkan penetapan daerah (*Zoning*). Hal ini berarti bahwa bisa jadi untuk tanah yang bersebelahan sekalipun misalnya di satu sisi ditanami anggur sedangkan di sisi lain di tanam kurma, maka mereka harus membayar jumlah Kharaj yang berbeda.

3) *Khums*

Para ulama mengatakan bahwa sumber pendapatannya apa pun harus dikenakan Khums sebesar 20%, sedangkan ulama Sunni beranggapan bahwa ayat ini hanya berlaku untuk harta rampasan perang saja. Imam Abu Ubaid dalam *Adi* menyatakan bahwa yang di maksud Khums ini bukan saja hasil perang, tetapi juga barang temuan dan barang tambang.

4) *Ghonimah dan Fay'i*

Jika tanah dan harta lain diperoleh dari peperangan disebut *Ghonimah*, jika pergantian pemerintahan tidak

dengan peperangan tetapi mungkin dengan kudeta atau memengkan pemilu, penyerahan secara damai Negara jajahan dan cara - cara lain maka tanah Negara dan harta benda lainnya disebut *Fa'i*.

5) *Jizyah*

Jizyah adalah pajak yang dibayar oleh orang -orang non-muslim sebagai pengganti fasilitas sosial-ekonomi dan layanan kesejahteraan lainnya, serta untuk mendapatkan perlindungan keamanan dari Negara Islam. *Jizyah* sama dengan Pull Tax, karena orang - orang non - muslim tidak mengenal zakat fitrah. Jumlah yang harus dibayar sama dengan jumlah minimum yang dibayar oleh orang Islam.⁸⁰

6) Pendapatan Lainnya

Pendapatan lainnya pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat diantaranya yaitu ada yang disebut Kaffarah, yaitu denda misalnya denda yang dikenakan kepada suami istri yang berhubungan di siang hari pada bulan puasa. Mereka harus membayar denda dan denda tersebut masuk dalam pendapatan Negara.

Menurut Huda, disamping penerimaan Negara yang pokok, pemerintah Negara Muslim juga memiliki sumber pendapatan lainnya seperti Wakaf (pemberian aset pribadi dari rakyat untuk kebutuhan publik yang terbatas maupun

⁸⁰ *Ibid.*

tidak terbatas, lalu Kalalah (bagian Negara dari warisan), dan barang temuan, harta karun, dan lainnya. Jika kebutuhan publik belum terpenuhi, Negara dapat memungut pajak tambahan. Negara juga dapat menerbitkan surat utang baik.

e. Pendapat Bahwa Boleh Melakukan Pemungutan Pajak Dalam Islam

Untuk memenuhi kebutuhan negara akan berbagai hal, seperti menanggulangi kemiskinan, menggaji tentara, dan lain-lain yang tidak terpenuhi dari zakat dan sedekah, maka harus ada sumber alternatif baru tentang kebijakan fiskal telah diuraikan, bahwa pilihan itu ada dua, yaitu pajak atau utang. Selama utang itu mengandung konsekuensi riba, maka pajak adalah pilihan yang lebih baik dan utama.⁸¹

Alasan sejumlah Fuqaha dan Ekonom Islam menyatakan bahwa pemungutan pajak di bolehkan

- 1) Hasan Al-Banna dalam bukunya Majmuatur-Rasa'il Mengatakan : Melihat tujuan keadilan sosial dan distribusi pendapatan yang merata, maka sistem perpajakan progresif tampaknya seirama dengan sasaran-sasaran Islam.
- 2) Marghinani dalam kitabnya Al-Hidayah Mengatakan : Jika sumber-sumber daya tidak mencukupi, negara harus menghimpun dana dari rakyat untuk memenuhi

⁸¹ *Ibid.*

kepentingan umum. Jika manfaat itu memang dinikmati rakyat kewajiban mereka membayar ongkosnya.

3) Maliki berpendapat

Karena menjaga kemaslahatan umat melalui sarana-sarana seperti keamanan, pendidikan dan kesehatan adalah wajib sedangkan kas negara tidak mencukupi (buktinya masih berhutang), maka pajak itu menjadi “wajib” walaupun demikian, Syara mengharamkan negara menguasai harta benda rakyat dengan kekuasaannya. Jika negara mengambilnya dengan menggunakan kekuatan dan cara paksa, berarti itu merampas hukumnya haram.

2. Pajak dalam konsep umum

a. Pengertian Pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari negara. Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara baik untuk membiayai pembangunan maupun untuk pembiayaan anggaran yang rutin.⁸²

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal

⁸²Brotodihadjo R. Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung: PT.Eresco, 1993), hal. 86

(kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan dengan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.⁸³

Menurut Undang-undang No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 ayat 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi tersebut memfokuskan pada fungsi budgetair dari pajak.

Ciri-ciri pajak antara lain:

- 1) Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- 2) Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta ke sektor Negara.
- 3) Pungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintah, baik rutin maupun pembangunan.
- 4) Tidak ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.

⁸³Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Andi Publisher, 2013), hal. 16

- 5) Selain berfungsi sebagai anggaran, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur, untuk melaksanakan kebijakan Negara di bidang sosial dan ekonomi.

b. Teori Pengenaan Pajak

Ada 5 teori pengenaan pajak, yaitu teori bakti, teori asuransi, teori kepentingan, teori daya pikul dan teori asas daya beli.⁸⁴

1) Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga Negara yang berbakti, rakyat selalu menyadari bahwa membayar pajak adalah suatu kewajiban.

2) Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda dan hak-hak rakyatnya, oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

3) Teori Kepentingan

Teori ini mengatakan bahwa pajak dipungut atas dasar besarnya kepentingan rakyat dalam memperoleh jasa-jasa yang diberikan oleh pemerintah. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap Negara, maka semakin tinggi pajak yang harus dibayar.

⁸⁴Anita, Chandasari. *Kontribusi Hotel dan Restoran terhadap Peningkatan Pendapatan*

Asli Daerah. Surabaya: Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi volume 5 Nomor 2. 2016.

4) Teori Daya Pikul

Teori ini mendasarkan pemungutan pajak berdasarkan jasa-jasa yang diberikan Negara kepada warganya. Biaya-biaya sehubungan dengan jasa ini harus dipikul oleh warga Negara yang menikmatinya. Teori ini mengemukakan bahwa beban pajak sesuai dengan keadilan, haruslah mempertimbangkan daya pikul seseorang.

5) Teori Asas Daya Beli

Pajak dipungut berdasar pada keadilan. Artinya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga Negara. Selanjutnya Negara akan menyalurkan kembali kemasyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat.

c. Fungsi Pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang mempunyai dua fungsi yaitu: fungsi anggaran (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulerend*).⁸⁵

- 1) Fungsi anggaran (*budgetair*) sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- 2) Fungsi mengatur (*regulerend*) sebagai alat mengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

d. Tarif Pajak

⁸⁵Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*..., h. 18

Dalam pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah menentukan tarif yang dipakai dalam suatu negara atau daerah tertentu. Menurut Mardiasmo ada empat macam tarif pajak :

1) Tarif Sebanding/ Proposional

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapa jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proposional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

2) Tarif tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak terutang tetap.

3) Tarif Progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

4) Tarif Degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar.

e. Macam- Macam Pajak

Pajak dapat dikelompokkan kedalam tiga kelompok, yaitu : Pajak Menurut Golongan, Pajak Menurut Sifat, dan Pajak Menurut Lembaga Pemungutannya.⁸⁶

1) Pajak Menurut Golongan

⁸⁶Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*...., h. 28

a) Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dilimpahkan kepada orang lain. Pajak menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contohnya adalah pajak penghasilan (PPh).

b) Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dilimpahkan kepada pihak lain atau pihak ketiga langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. contohnya adalah pajak pertambahan nilai (PPn).

2) Pajak Menurut Sifat

Pajak menurut sifat dibedakan menjadi dua, yaitu :

a) Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak memperhatikan keadaan subjeknya. Contohnya adalah pajak penghasilan.

b) Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objek, baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek

pajak maupun tempat tinggal. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

3) Pajak Menurut Lembaga Pemungutannya

Pajak menurut lembaga pemungutannya terbagi menjadi dua, yaitu:

a) Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Sebagai contoh adalah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah.

b) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat I maupun tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

f. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga, yaitu:⁸⁷

1) Official Assessment System

Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya adalah :

⁸⁷Thomas Sumarsan , *Perpajakan Indonesia*, (Yogyakarta: Indeks,2013), hal. 49

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
- b) Wajib pajak bersifat pasif
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak

2) Self Assessment System

Self assessment system adalah sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya yaitu:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada adalah wajib pajak sendiri
- b) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutang
- c) Fiskus tidak ikut campur hanya mengawasi.

3) Withholding System

Withholding system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan). Ciri-cirinya adalah wewenang menentukan besarnya pajak terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

g. Syarat Pemungutan Pajak

- 1) Pemungutan Pajak Harus Adil

Pajak pengenaannya harus adil serta diatur dalam perundang-undangan. Adil adalah memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan pengajuan banding.

2) Pemungutan Pajak Harus berdasarkan Undang-undang (syarat yudiris)

Di Indonesia Pajak diatur dalam Undang-undang 1945 pasal 23 ayat 2 yaitu memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, bagi Negara maupun warganya.

3) Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomi)

Pajak dipungut dengan tidak mengganggu proses kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan ekonomi masyarakat.

4) Pungutan Harus Efektif (syarat finansial)

Biaya pungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pungutannya.

5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

h. Asas-asas Pengenaan Pajak

Asas-asas pengenaan pajak⁸⁸, yaitu:

1) Asas Domisili

⁸⁸Mardiasmo , *Perpajakan Edisi Revisi.....*, h. 27

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya baik penghasilan yang berada dalam negeri mau pun luar negeri.

2) Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Contohnya adalah tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia maka dari penghasilan yang didapat di Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia.

3) Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara. Asas ini menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan.

Terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh negara sebagai asas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak. Asas utama yang paling sering digunakan oleh negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah, Asas domisili, berdasarkan asas ini negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan (wajib pajak) yang bertempat tinggal di wilayahnya.⁸⁹

i. Hukum Pajak

⁸⁹Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Andi Publisher, 2011), h.

Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak. Ada dua macam hukum pajak, yaitu: Hukum pajak materiil dan Hukum pajak formil.⁹⁰

- 1) Hukum pajak materiil, menurut norma- norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak.
- 2) Hukum pajak formil, memuat bentuk atau tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil). Hukum ini antara lain : Tata cara penyelenggaraan prosedur penetapan suatu utang pajak. Hak- hak pemerintah untuk mengadakan pengawasan terhadap para wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak dan kewajiban wajib pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan dan hak-hak wajib pajak, misalnya mengajukan keberatan dan banding.

B. Pajak Hotel

1. Pengertian Pajak Hotel

⁹⁰Mardiasmo, *Perpajakan....*, h. 2

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1, hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, pesangrahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos yang jumlah kamar lebih dari 10 kamar.⁹¹

Pengertian lain hotel adalah suatu bangunan lambing perusahaan atau badan usaha akomodasi yang menyediakan jasa penginapan, penyedia makanan dan minuman serta fasilitas jasa lainnya dimana semua layanan itu diperuntukkan bagi masyarakat umum baik mereka yang bermalam dihotel tersebut ataupun mereka yang hanya menggunakan fasilitas tertentu yang dimiliki hotel.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan retribusi Daerah tertulis pada pasal 32 yang menjelaskan objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olahraga dan hiburan, jasa penunjang sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 adalah fasilitas telepon, internet, fotokopi, dan fasilitas yang sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel, tidak termasuk objek pajak hotel sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 adalah jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah, jasa sewa apartemen dan sejenisnya, jasa tempat

⁹¹Siahaan, Marihot, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hal. 28

tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan, jasa tempat tinggal di rumah sakit, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis, berikutnya adalah jasa biro perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pemerintah daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang Pemungutan pajak hotel harus didasarkan pada peraturan daerah.

Peraturan daerah tentang pajak hotel memberikan kepastian hukum mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak dan cara pemungutan pajak. Selain itu sanksi dan hukuman bagi setiap pelanggaran pajak juga diatur dalam peraturan daerah tersebut. Akumulasi pemungutan pajak hotel merupakan pendapatan asli daerah yang sangat bermanfaat untuk membiayai pembangunan daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan retribusi Daerah tertulis pada pasal 33, pasal tersebut menjelaskan sebagai berikut:

- a. Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.
- b. Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

2. Objek Pajak Hotel

Pajak hotel termasuk dalam klasifikasi pajak objektif, sebagaimana menurut pendapat Rohmad Soemitro pajak objektif adalah pajak yang erat hubungannya dengan objek pajak sehingga besarnya pajak hanya tergantung kepada keadaan objek itu dan sama sekali tidak menghiraukan dan tidak dipengaruhi oleh keadaan subjek pajak.

Menurut Siahaan mengatakan yang termasuk objek pajak hotel dan bukan objek pajak hotel ialah⁹² :

a. Objek pajak hotel

Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk pelayanan:

- 1) Fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek
- 2) Pelayanan penunjang sebagai pelengkapan fasilitas penginapan atau tempat jangka pendek yang sifatnya memberi kemudahan dan kenyamanan.
- 3) Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel bukan untuk fasilitas umum.
- 4) Jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel

b. Bukan objek pajak hotel

Pada pajak hotel tidak semua pelayanan yang diberikan oleh penginapan dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak yaitu :

⁹²Siahaan, Marihot, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.....h.247

- 1) Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu pada hotel.
- 2) Pelayanan tinggal di asrama dan pondok pesantren
- 3) Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan di hotel yang digunakan oleh yang bukan tamu hotel
- 4) Pertokoan, perkantoran perbankan salon yang digunakan oleh umum di hotel.
- 5) Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum.

C. Pendapatan Asli Daerah

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yang berupa, pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.⁹³ Pendapatan asli daerah secara singkat adalah pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan peraturan daerah.⁹⁴

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan (melalui peraturan daerah) untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut.⁹⁵

⁹³Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik*,(Jakarta: Erlangga,2005),hal. 23

⁹⁴Nurlan Darise, *Akuntansi Keuangan Daerah*, (Jakarta : Indeks, 2008), hal. 137

⁹⁵Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Andi Publisher, 2009), hal. 12

Pajak daerah dapat pula di artikan sebagai iuran wajib pajak yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung dan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.⁹⁶

Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jadi Peneliti menyimpulkan dari beberapa pendapat mengenai pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan keuangan suatu daerah dimana penerimaan keuangan itu bersumber dari potensi-potensi yang ada di daerah tersebut misalnya pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain serta penerimaan keuangan tersebut yang diatur oleh Peraturan Daerah.

Pajak daerah merupakan wewenang daerah yang diatur dalam undang-undang tentang pokok-pokok pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah itu sendiri. Pajak daerah, sebagai salah satu pendapatan asli daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan

⁹⁶Nurlan Darise,.... hal. 135

kesejahteraan masyarakat. Meskipun beberapa jenis pajak daerah sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Penerimaan dari pajak daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Seperti halnya dengan pajak pada umumnya, pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu pertama sebagai sumber pendapatan daerah (*budgetary*) dan sebagai alat pengatur (*regulatory*). Dalam hal-hal tertentu suatu jenis pajak dapat lebih bersifat sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi dapat pula suatu jenis pajak tertentu lebih merupakan alat ukur untuk mengatur alokasi dan distribusi suatu kegiatan ekonomi dalam suatu daerah atau wilayah tertentu. Sebagai sumber pendapatan dari pemerintah daerah, setiap pajak harus memenuhi *Smith's canons* yang ada empat yang meliputi yaitu:⁹⁷

a. Unsur Keadilan (*Equality*)

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak harus dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap

⁹⁷Winda A. Mustika. *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi terhadap pendapatan asli daerah*. Surabaya: Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi volume 3 Nomor 6. 2014.

wajib pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diterima.

b. Unsur Kepastian (*Certainty*)

Kepastian hukum mengenai subjek, objek, tarif dan ketentuan-ketentuan pajak lainnya yang di atur oleh undang-undang. Penetapan pajak itu tidak ditetapkan sewenang-wenang. Oleh karena itu wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar dan kapan batas akhir pembayaran.

c. Unsur Kelayakan (*Convenience*)

Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak atau di pungut pada saat kondisi yang baik secara ekonomi

d. Efisien (*Economy*)

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang ditanggung oleh wajib pajak. Pajak daerah harus memenuhi unsur kepastian, artinya pajak tersebut dipungut tepat pada waktunya

2. Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dasar hukum Pendapatan Asli Daerah terdapat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pengertian Pendapatan Asli Daerah terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yaitu Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Sumber –Sumber Pendapatan Asli Daerah

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Bab V pasal 6 menjelaskan tentang sumber-sumber pendapatan daerah terdiri atas:

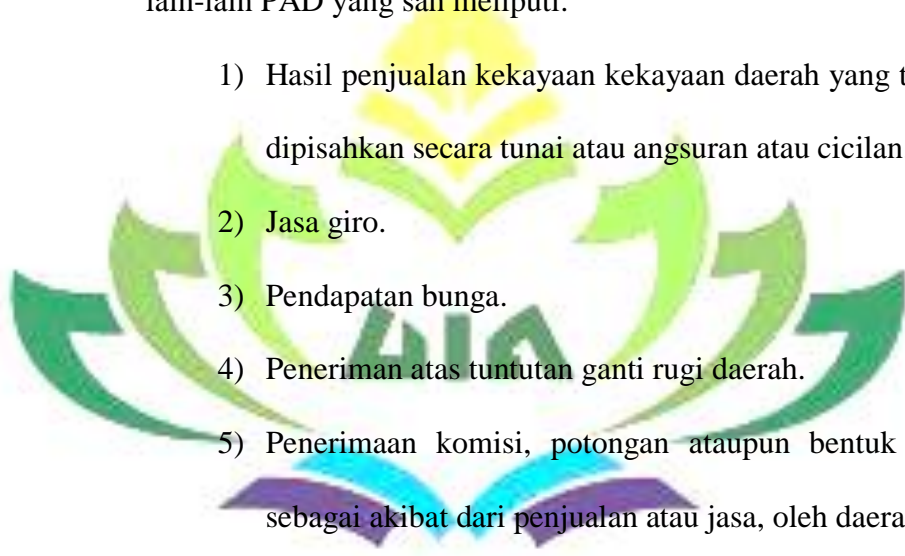
- a. Pajak daerah yaitu pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya bisa dapat dipaksakan.
- b. Retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat

ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya budgeternya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yangtelah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.

- c. Hasil perusahaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan hasil yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.⁹⁸. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, member jasa, menyelenggarakan kemamfaatan umum dan memperkembangkan perekonomian daerah.
- d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusli daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang pembuka bagi

⁹⁸Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Ketiga*, (Jakarta : Salemba Empat,2007), hal. 98

pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.⁹⁹Pendapatan asli daerah lain-lain yang sah Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pasal 26 ayat 4, lain-lain PAD yang sah meliputi:

- 
- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran atau cicilan.
 - 2) Jasa giro.
 - 3) Pendapatan bunga.
 - 4) Penerimaan atas tuntutan ganti rugi daerah.
 - 5) Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau jasa, oleh daerah.
 - 6) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
 - 7) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
 - 8) Pendapatan denda pajak.
 - 9) Pendapatan denda retribusi.
 - 10) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan.

4. Jenis Pajak

⁹⁹Undang-undang No. 33 Tahun 2004, Bab V Pasal 6 tentang Pendapatan Asli Daerah

Pajak daerah indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 tentang pajak daerah dan retribusi daerah terdapat, 5 jenis pajak provinsi dan 11 jenis pajak Kabupaten/Kota.

a. Pajak provinsi terdiri dari :

- 1) Pajak kendaraan bermotor, yaitu pajak atas kepemilikan atau penguasa kendaraan bermotor, Tarif Pajak kendaraan bermotor paling tinggi 10%
- 2) Bea balik nama kendaraan bermotor yaitu pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat dari perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha, Tarif Pajak Bea balik nama kendaraan bermotor paling tinggi 20%
- 3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor yaitu pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor, Tarif Pajak bahan bakar kendaraan bermotor paling tinggi 10%
- 4) Pajak air permukaan yaitu pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air permukaan, Tarif Pajak air permukaan paling tinggi 10%
- 5) Pajak rokok yaitu pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah, Tarif Pajak rokok paling tinggi 10%.

b. Pajak kabupaten/kota terdiri dari¹⁰⁰:

1) Pajak hotel

Pajak hotel adalah iuran yang dipungut oleh pemerintah daerah atas fasilitas penyediaan jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan pungutan bayaran, Tarif Pajak hotel paling tinggi 10%.

2) Pajak Restoran

Pajak restoran adalah iuran yang dipungut oleh pemerintah daerah atas fasilitas penyedia makanan/minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering Tarif Pajak Restoran paling tinggi 10%.

3) Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah iuran yang dipungut pemerintah daerah atas penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran, Tarif Pajak Hiburan paling tinggi 35%.

4) Pajak reklame

Pajak reklame adalah iuran yang dipungut oleh pemerintah daerah atas pengadaan reklame yang dipungut bayaran. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum

¹⁰⁰Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pada Pajak Provinsi dan tarif Pajaknya

terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan dinikmati oleh umum, Tarif Pajak Reklame paling tinggi 25%.

5) Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah iuran yang dipungut oleh pemerintah daerah atas setiap penggunaan tenaga listrik dengan dipungut bayaran. Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik baik yang sendiri maupun diperoleh dari sumber lain Tarif Pajak Penerangan Jalan paling tinggi 10%

6) Pajak mineral bukan logam dan batuan, Tarif Pajak mineral bukan logam dan batuan paling tinggi 25%

7) Pajak Parkir

Pajak parkir adalah iuran yang pemerintah daerah atur atas, setiap penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor, dipungut dengan nama pajak parkir Tarif Pajak Parkir paling tinggi 30%.

8) Pajak Air Tanah

Pajak yang dipungut setiap pengambilan atau pemanfaatan air tanah dipungut pajak dengan nama pajak air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau

batuan dibawah permukaan tanah Tarif Pajak Air Tanah paling tinggi 20%

9) Pajak Sarang Burung Walet

Dasar pengenaan pajak sarang burung walet adalah nilai jual sarang burung walet dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku didaerah dengan volume sarang walet Tarif Pajak Sarang Burung Walet paling tinggi 10%.

10) Pajak Bumi Bangunan Pedesaan/Perkotaan

Pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan yaitu pajak atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan Tarif Pajak Bumi Bangunan Pedesaan/Perkotaan paling tinggi 0,3%.

11) Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan

Perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah atau bangunan oleh orang pribadi atau badan Tarif Pajak Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan paling tinggi 5%

5. Dasar Pengenaan Pajak

Undang-undang No 34 tahun 2000 dengan tegas menetapkan dasar pengenaan pajak daerah.¹⁰¹ Dasar pengenaan pajak provinsi adalah :

- a. Pajak kendaraan bermotor dikenakan atas : nilai jual kendaraan serta faktor-faktor penyesuaian yang mencerminkan biaya ekonomis yang diakibatkan oleh pengguna kendaraan bermotor. Misalnya kerusakan jalan dan lingkungan.
- b. Bea balik nama kendaraan bermotor dikenakan atas : nilai jual kendaraan bermotor. Begitu juga kendaraan diatas air.
- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor dikenakan atas : nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor.
- d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan dikenakan atas : nilai perolehan air yang diambil yang dimanfaatkan antara lain berdasarkan jenis, volume kualitas air dan lokasi sumber air.

Dasar pengenaan pajak kabupaten/kota adalah :

- a. Pajak hotel dikenakan atas : jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel
- b. Pajak restoran dikenakan atas jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran
- c. Pajak hiburan dikenakan atas jumlah pembayaran.¹⁰²

D. Kontribusi

¹⁰¹Siahaan, Marihot, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. (Jakarta: PT.Grafindo Persada,2005) h.64

¹⁰²Djoko Prakoso, *Pajak dan Retribusi Daerah* , (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal. 33

1. Pengertian Kontribusi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia pengertian kontribusi adalah sumbangan, sedangkan menurut kamus ekonomi kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama.¹⁰³

Kontribusi adalah hasil manfaat dari suatu pekerjaan baik berupa uang maupun jasa yang dapat dihitung berdasarkan suatu nilai.¹⁰⁴ Jadi yang dimaksud kontribusi dalam penelitian ini adalah sumbangan yang didapat dari pajak hotel dalam rangka menunjang pendapatan asli daerah Kota Bandar Lampung.

Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi adalah sebagai berikut.¹⁰⁵

$$P_n = \frac{QX_n}{QY_n} \times 100\%$$

Keterangan :

P_n = Kontribusi penerimaan pajak terhadap (PAD)

QX = Jumlah realisasi penerimaan pajak

QY = Jumlah realisasi penerimaan PAD

n = Tahun atau periode tertentu

¹⁰³Poerwardarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,2006),hal.925

¹⁰⁴*ibid*

¹⁰⁵Abdul Halim, *Akutansi Keuangan Daerah*, (Jakarta: Salemba empat,2013),h.34

Apabila hasil perhitungan kontribusi sumber-sumber PAD menghasilkan angka atau presentase melebihi 30%, maka sumber- sumber PAD dapat dikatakan kontribusi sangat baik.

2. Efektivitas

Efektivitas berasal dari suku kata efektif yang berasal dari bahas Inggris yaitu effective yang berarti berhasil, atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik.¹⁰⁶ Pengertian lain efektifitas adalah perbandingan antara realisasi suatu pendapatan dengan target yang ditetapkan juga bisa dikatakan perbandingan antara outcome dengan output. Outcoe adalah tujuan/target yang ditetapkan.¹⁰⁷ Efektifitas Pajak Hotel yaitu perbandingan antara penerimaan Pajak Hotel dengan target penerimaan untuk mengetahui tingkat efektifitas dari pelaksanaan penerimaan Pajak Hotel, dengan membandingkan target yang ditetapkan dengan hasil realisasinya, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Target Realisasi Pajak Hotel}} \times 100\%$$

Dimana :

X = Realisasi Penerimaan Pajak Hotel

Y= Target Penerimaan Pajak Hotel

¹⁰⁶ Aini Hamdan, *Perpajakan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hal.

¹⁰⁷ Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: Salemba Empat, 2004),h.75

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 690.900/327 tahun 1994 tentang pedoman penilaian kinerja keuangan, standarisasi tingkat efektifitas di tetapkan sebagai berikut:

- a. Koefisien efektifitas di atas 0,00%-10% berarti sangat Kurang efektif
- b. Koefisien efektifitas bernilai antara 10,10%-20% berarti kurang efektif
- c. Koefisien efektifitas bernilai antara 20,10%-30% berarti sedang efektif
- d. Koefisien efektifitas bernilai antara 40,10%-50% berarti baik efektif
- e. Koefisien efektifitas bernilai antara >50% berarti sangat baik efektif.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dilakukan, idealnya agar peneliti mengetahui hal-hal yang telah diteliti dan yang belum diteliti sehingga tidak terjadi duplikasi penelitian. Terdapat beberapa hasil penelitian yang peneliti temukan terkait Penelitian ini, sebagai berikut :

1. Jurnal berjudul “ Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah” (Studi Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Mojokerto). Telah ditulis oleh Hamida El Laila Eka Nur Jannah, Imam Suyadi, Hamidah Nayati Utami. Penelitian ini berfokus untuk mengetahui kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Mojokerto untuk meningkatkan PAD). Metode Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap PAD selama periode 2014 – 2015 pada setiap bulannya

sebesar 53.33% yang berarti kontribusi pajak daerah sangat baik.¹⁰⁸

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Hamida El Laila Eka Nur Jannah, Imam Suyadi, Hamidah Nayati Utami yaitu berfokus pada kontribusi pajak hotel terhadap peningkatan pendapatan PAD.

2. Jurnal berjudul “Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu” (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Batu Tahun 2012 - 2016). Telah ditulis Oleh Zainul Fikri, Ronny Malavia Mardani. Penelitian ini berfokus pada Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah, Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan pada tahun 2012 -2016. Metode Analisis Data Analisis Statistik Deskriptif Analisis Regresi Linier Berganda. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Zainul Fikri, Ronny Malavia Mardani, yaitu berfokus pada kontribusi pajak hotel terhadap peningkatan pendapatan PAD, kemudian analisis yang digunakan analisis regresi sederhana dan hanya ada satu variabel X di penelitian ini.¹⁰⁹

3. Jurnal berjudul “Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel Dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan” Telah ditulis oleh Nabila Suha Bahmid1, Herry Wahyudi. Penelitian ini

¹⁰⁸Hamida El Laila Eka Nur Jannah, Imam Suyadi, Hamidah Nayati Utami, “Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah,”Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 10 No. 1 2016|

¹⁰⁹Zainul Fikri, Ronny Malavia Mardani, “Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu,”e – Jurnal Riset Manajemen

berfokus hanya untuk mengetahui hasil pemungutan, ada atau tidaknya pengaruh pemungutan pajak hotel dan pajak hiburan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Medan. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan asosiatif. Penyusunan skripsi ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik dokumentai dan kepustakaan. Hipotesis diuji dengan menggunakan uji t. Hasil penelitian yang dilakukan di BPPRD Kota Medan menunjukkan bahwa pemungutan pajak hotel dan hiburan mengalami peningkatan tetapi masih ada yang tidak mencapai target. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Nabila¹¹⁰ Suha Bahmid1, Herry Wahyudi penelitian ini berfokus pada kontribusi pajak hotel terhadap peningkatan pendapatan PAD dan hanya ada satu variabel X dalam penelitian ini.¹¹¹

4. Jurnal Berjudul “Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Minahasa Selatan” Telah Ditulis Oleh Agriani Lombogia. Tujuan Penelitian Ini Berfokus Hanya untuk mengetahui kontribusi pajak hotel terhadap PAD di Kabupaten Minahasa Selatan. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode Analisis yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak hotel dalam kurun waktu 2012-2015 tidak selalu

¹¹¹Nabila Suha Bahmidi, Herry Wahyudi, “Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel Dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan,”Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis Vol. 18 No. 1,Maret 2018 ISSN : 1693-7597

meningkat atau mengalami fluktuatif.¹¹² Dimana presentase kontribusi pajak hotel terbesar terjadi pada tahun 2015 sebesar 0,061% dan presentase terendah di tahun 2012 sebesar 0.023% dengan rata-rata kontribusi 0,036%. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Agriani Lombogia penelitian ini penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif.

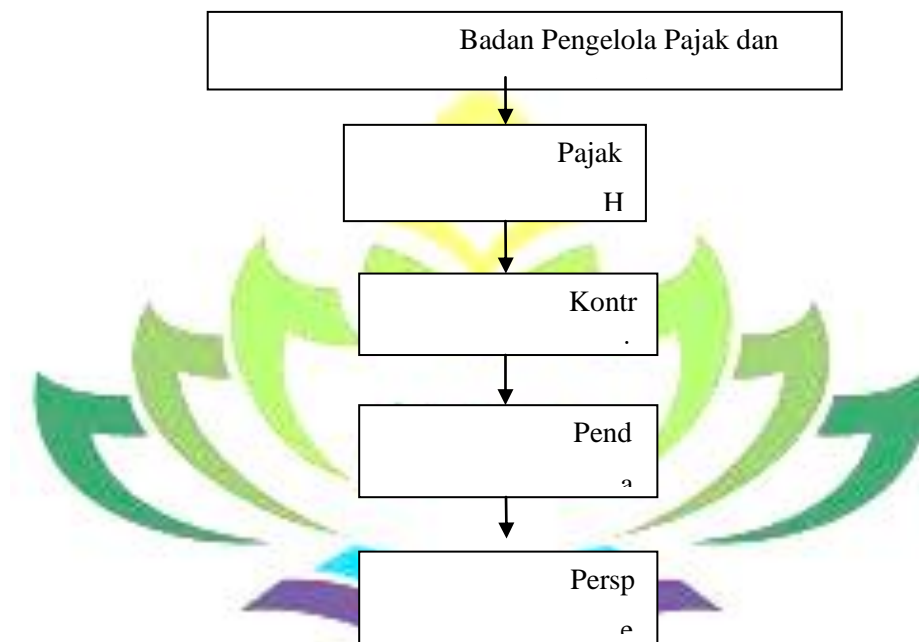
Secara spesifik argumen yang membedakan dengan penelitian diatas adalah dimana dalam penelitian ini memfokuskan pada Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam.

F. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kajian teori maka dapat disusun kerangka pemikiran sebagai berikut penerimaan pajak hotel dapat membantu dalam peningkatan pendapatan suatu daerah, seberapa besar peningkatannya pajak hotel untuk memenuhi tingkat pendapatan asli daerah, melalui penerimaan pajak hotel yang tujuannya juga untuk mengukur potensi penerimaan pajak hotel yang sudah menunjukkan tingkat yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan suatu daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, dan digunakan untuk mengukur kontribusi dalam penerimaan pajak hotel, dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

¹¹² Agriani Lombogia "Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Minahasa Selatan" Jurnal EMBA Vol.4 No.2 Juni 2016, Hal. 530-537

Gambar Kerangka Pikir



G. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru diberikan dan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan landasan teori yang telah dijelaskan sebelumnya, maka hipotesis dari dari penelitian ini adalah.

Ho : Di duga bahwa Kontribusi Pajak Hotel (x) Sangat Kurang Baik terhadap PAD (y) Kota Bandar Lampung tahun 2013-2017

H_1 : Di duga bahwa ada Kontribusi Pajak Hotel (x) yang Sangat Baik terhadap PAD (y) Kota Bandar Lampung 2013-2017.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kuantitatif, yaitu penelitian dengan memperoleh data yang berupa angka, atau data kualitatif adalah penelitian yang banyak menuntut penggunaan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya, demikian pula pada tahap kesimpulan penelitian akan lebih baik bila disertai tabel, grafik atau tampilan lainnya, yang diangkakan pendekatan metode ini diangkat dari data, lalu diproses menjadi informasi yang berharga bagi pengambilan keputusan.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang dilakukan dengan pendekatan kuantitatif yang merupakan teknik analisis yang memberikan informasi mengenai data yang diamati dan bertujuan menguji hipotesa dan menarik kesimpulan yang digeneralisasikan terhadap populasi.¹¹³ Penelitian ini menggambarkan tentang Kontribusi Pajak Kota Bandar Lampung pada periode 2013-2017 berdasarkan data-data, menganalisis dan menginterpretasikannya.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literature (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun hasil penelitian terdahulu mengenai Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD. Penelitian ini menggali dan

¹¹³Prof.Dr.Sugiono,*Metode Penelitian Manajemen*(Bandung: Alfabeta,2016), H.238

menganalisis yang bersumber dari dinas Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Dinas Pariwisata dan Badan Pusat Statistik . Kota Bandar Lampung. Dalam prosesnya, penelitian ini mengangkat data dan permasalahannya yang ada secara langsung, tentang berbagai hal yang berhubungan pada permasalahan yang akan dibahas secara sistematis dan mendalam¹¹⁴Dalam hal ini peneliti akan menggambarkan dan menjelaskan kontribusi pajak hotel terhadap peningkatan PAD

B. Populasi dan Sampel

Populasi Menurut Sutrisno Hadi populasi adalah keseluruhan objek penelitian semua individu dan untuk setiap kenyataan yang diperoleh dari sampel hendaknya digeneralisasikan.¹¹⁵ Maka dalam penelitian ini yang dijadikan Populasi objek penelitian adalah keseluruhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung dan Realisasi pajak hotel dan Realisasi PAD.periode tahun 2013-2017 yang di dapat dari dinas Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD)

Sampel adalah sebagian populasi yang karakteristiknya akan diteliti. Mengingat luasnya wilayah. Dalam penelitian ini, tidak semua populasi akan dijadikan sumber data, Sampel adalah bagian suatu objek atau subjek yang mewakili populasi. Dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu atau membuat kriteria yang digunakan sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah

¹¹⁴Prof.Dr.Sugiono,*Metode Penelitian Manajemen*(Bandung: Alfabeta,2016), H.238-239

¹¹⁵Sutrisno Hadi. *Metodologi Research*. (Yogyakarta: UGM,1985), h 70.

beberapa staf yang bekerja di Dinas PARIWISATA dan BPPRD Kasubag Program Informasi dan Kasubag Bidang Pajak

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini data Sekunder adalah data yang tidak berkaitan langsung dengan sumber aslinya. atau sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹¹⁶ Sedangkan data sekunder menurut Aburrahmat Fhatoni adalah data yang sudah jadi biasanya yang telah tersusun dalam bentuk dokumen, misalnya mengenai data demografi suatu daerah dan sebagainya. Dalam penelitian ini data yang didapat adalah mengenai Realisasi Pajak Hotel dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah, jumlah hotel, dan wajib pajak hotel melalui Dinas BPPRD dan Dinas PARIWISA.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini peneliti melakukan teknik pengumpulan data dengan menggunakan beberapa metode diantaranya, dokumentasi dan wawancara.

1. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan kajian yang diteliti, sehingga memperoleh data yang lengkap dan bukan berdasarkan perkiraan.

Data dokumentasi bisa berbentuk tulisan seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, gambar/foto atau karya-

¹¹⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 225

karya yang sudah tersedia dalam catatan dokumen. Metode dokumentasi dalam penelitian ini sumber informasi yang berhubungan dengan pendapatan pajak hotel wajib pajak hotel di dinas yang terkait dalam data-data yang diinginkan di Dinas BPPRD, dan Dinas PARIWISATA, yang mengetahui data terkait dengan Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Hotel Kota Bandar Lampung yang berupa tulisan dan gambar/foto digunakan untuk memperjelas data yang ada dengan bukti tanpa perkiraan.

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara atau *interview* adalah pengumpulan data dengan jalan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh peneliti (pengumpul data) kepada informan, dan jawaban – jawaban informan dicatat atau direkam dengan alat perekam atau *handphone*. Cara pengumpulan data dengan Tanya jawab sepihak, dikerjakan dengan sistematis berdasarkan pada tujuan penelitian.

Dalam melakukan wawancara, peneliti menggunakan wawancara *Interview* Bebas dan *Interview* Terpimpin maksudnya, wawancara dilakukan dengan mempersiapkan kerangka pertanyaan yang disusun sedemikian rupa sehingga informan dapat memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan secara bebas dan mendalam. Penelitian ini melakukan tanya jawab di dinas BPPRD dengan bagian bidang pajak, dan dinas PARIWISATA dengan kasubag program informasi yang mengetahui data terkait dengan Pendapatan Asli Daerah, Pajak

Hotel dan jumlah hotel serta jumlah kunjungan wisatawan Kota Bandar Lampung.

E. Metode Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif yaitu data yang berupa bilangan atau angka. Metode analisis ini digunakan untuk mendeskripsikan kontribusi pajak dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknis analisis deskriptif rasio. Analisis rasio yang digunakan adalah untuk mengukur kontribusi.

Adapun metode analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak hotel terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Bandar Lampung, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak hotel terhadap PAD.

1. Melakukan Analisis Kontribusi penerimaan pajak Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi sebagai berikut.¹¹⁷

$\text{Kontribusi pajak hotel} = \frac{X}{Y} \times 100\%$
--

Keterangan:

X= Penerimaan Pajak Hotel di Kota Bandar Lampung

Y= Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung

¹¹⁷ Aini Hamdan, *Perpajakan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h.33

2. Melakukan Uji efektifitas kriteria kontribusi pajak terhadap PAD

Pengertian lain efektifitas adalah perbandingan antara realisasi suatu pendapatan dengan target yang ditetapkan.¹¹⁸ Dengan kata lain efektifitas berarti tingkat pencapaian hasil program kerja dengan target yang ditetapkan, juga bisa dikatakan merupakan perbandingan antara outcome dengan output. Outcome adalah tujuan/target yang ditetapkan.¹¹⁹

$$\text{Kontribusi pajak hotel} = \frac{X}{Y} \times 100\%$$

Keterangan :

X = Realisasi Pajak Hotel

Y = Target Pajak Hotel

Untuk mengetahui arti dari perhitungan kontribusi yang telah dihitung, maka dilakukan pencocokan dengan kriteria kinerja keuangan berdasarkan kriteria yang telah disusun oleh Tim Litbang Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996.

Kriteria untuk mengetahui kontribusi pajak hotel dalam menopang Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:¹²⁰

¹¹⁹ Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: Salemba Empat, 2004), h.75

¹²⁰ Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

Tabel.4
Kriteria Nilai Kontribusi

Nilai Kriteria Efektivitas Persentase Kontribusi	Kriteria
0,00%-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

- 1) Presentase antara 0,00%-10% artinya Sangat Kurang mempunyai kontribusi.
- 2) Presentase antara 10,10%-20% artinya Kurang mempunyai kontribusi
- 3) Presentase antara 20,10%-30% artinya Sedang mempunyai kontribusi
- 4) Presentase 30,10%-40% artinya Cukup Baik mempunyai kontribusi
- 5) Presentase 40,10%-50% artinya Baik mempunyai kontribusi
- 6) Persentase > 50% artinya sangat baik mempunyai kontribusi.

Dengan analisis ini dapat diketahui seberapa besar kontribusi pajak Hotel terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung.

F. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek penelitian. Dalam penelitian ini digunakan dua jenis variabel penelitian, yaitu :

1. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen sering disebut variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah Pajak Hotel Kota Bandar Lampung.

2. Variabel Independen (X)

Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor. Dalam bahasa Indonesia sering disebut variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah.⁶⁵

G. Definisi Operasional

Definisi Operasional variabel penelitian merupakan penjelasan dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian terhadap indikator-indikator yang membentuknya. Tujuannya agar peneliti dapat mencapai alat ukur yang sesuai dengan hakikat variabel yang sudah

didefinisikan konsepnya maka peneliti harus memasukkan proses atau operasionalnya alat ukur yang akan digunakan untuk kualifikasi gejala atau variabel yang diteliti .

Tabel 5.
Definisi Operasional Penelitian

No	Variabel	Devinisi Variabel	Indikator Variabel	Skala Ukuran
1.	Pajak Hotel	Pajak Hotel adalah pungutan daerah atas Orang Pribadi atau Badan yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya, melakukan usaha dibidang jasa penginapan	Realisasi penerimaan pajak hotel tahun 2013-2017	Nominal
2.	Kontribusi pajak hotel	Digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak hotel memberikan sumbangan dalam pendapatan Asli Daerah	Ralisasi pendapatan pajak hotel Realisasi penerimaan PAD	<ul style="list-style-type: none"> • Sangat kurang • Kurang • Cukup • Sedang • Baik • Sangat baik

3.	Pendapatan Asli Daerah	Sumber keuangan daerah yang didapat dari berbagai sektor pajak berdasarkan peraturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Realisasi penerimaan PAD dari tahun 2013-2017	Nominal
----	------------------------	---	---	---------

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Profil Kota Bandar Lampung

1. Sejarah Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung merupakan Ibukota Propinsi Lampung, selain merupakan pusat kegiatan Pemerintahan, Sosial Politik, Pendidikan dan Kebudayaan, juga merupakan pusat kegiatan perekonomian, yang secara ekonomis menguntungkan pertumbuhan dan pengembangan kota Bandar Lampung, yaitu sebagai pusat perdagangan, industri dan pariwisata. Dengan letaknya yang strategis, di mana Propinsi Lampung sebagai daerah lalu lintas dan transit berbagai kegiatan perekonomian antara Pulau Sumatra dan Pulau Jawa. Hal ini menjadikan Kota Bandar Lampung berkembang cukup pesat dalam wilayah Propinsi Lampung.

Sebelum tanggal 18 maret 1994 Propinsi Lampung merupakan Keresidenan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang No. 3 tahun 1964, yang kemudian menjadi Undang-undang No.14 tahun 1964, Keresidenan Lampung ditingkatkan menjadi Propinsi Lampung dengan Ibu Kota nya Tanjungkarang–Telukbetung. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1983. Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang–Telukbetung diganti namanya menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung

terhitung sejak tanggal 17 Juni 1983, dan sejak tahun 1999 berubah nama menjadi Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1975 dan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1982 tentang perubahan wilayah maka Kota Bandar Lampung dimekarkan dari 4 kecamatan 30 kelurahan menjadi 9 kecamatan dengan 58 kelurahan. Kemudian berdasarkan surat keputusan Gubernur/KDH Tingkat I Lampung Nomor G/185.B.111/Hk/1988 tanggal 6 Juli 1988 serta Surat Persetujuan MENDAGRI nomor 140/1799/PUOD tanggal 19 Mei 1987 tentang pemekaran kelurahan di wilayah Kota Bandar Lampung, maka Kota Bandar Lampung dimekarkan menjadi 9 kecamatan dan 84 kelurahan. Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2001 tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan kecamatan dan kelurahan, maka kota Bandar Lampung menjadi 13 kecamatan dengan 98 kelurahan.

Kelurahan dan kecamatan, yang kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2012, kembali dilakukan pemekaran kecamatan yang semula berjumlah 13 kecamatan menjadi 20 kecamatan dan pemekaran kelurahan yang semula berjumlah 98 menjadi 128 kelurahan⁶⁶

⁶⁶ Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung 2017

Secara geografis Kota Bandar Lampung terletak pada 5o20'sampai dengan 5o30'lintang selatan dan 105o28' sampai dengan 105o37' bujur timur. Ibukota propinsi Lampung ini berada di Teluk Lampung yang terletak di ujung selatan Pulau Sumatera. Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah 197,22 Km² yang terdiri dari 20 kecamatan dan 126 kelurahan. Secara administratif Kota Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah 197,22 Km² yang terdiri dari 20 kecamatan dan 126 kelurahan. Secara administratif Kota Bandar Lampung dibatasi oleh:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Lampung.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gedung Tataan dan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

Secara Topografi Kota Bandar Lampung terletak pada ketinggian 0 sampai 700 meter diatas permukaan laut dengan topografi yang terdiri dari :

- a. Daerah pantai yaitu sekitar Teluk Betung bagian selatan dan Panjang.
- b. Daerah perbukitan yaitu sekitar Teluk Betung bagian utara

- c. Daerah dataran tinggi serta sedikit bergelombang terdapat di sekitar Tanjung Karang bagian Barat yang dipengaruhi oleh gunung Balau serta perbukitan Batu Serampok dibagian Timur Selatan.
- d. Teluk Lampung dan pulau-pulau kecil bagian Selatan. Ditengah-tengah kota mengalir beberapa sungai seperti sungai Way Halim, Way Balau, Way Awi, Way Simpung diwilayah Tanjung Karang, dan Way Kuripan, Way Balau, Way Kupang, Way Garuntang, Way Kuwala mengalir di wilayah Teluk betung.

Daerah hulu sungai berada dibagian barat, daerah hilir sungai berada di sebelah selatan yaitu di wilayah pantai. Luas wilayah yang datar hingga landai meliputi 60 persen total wilayah, landai hingga miring meliputi 35 persen total wilayah, dan sangat miring hingga curam meliputi 4 persen total wilayah. Sebagian wilayah Kota Bandar Lampung merupakan perbukitan, yang diantaranya yaitu: Gunung Kunyit, Gunung Mastur, Gunung Bakung, Gunung Sulah, Gunung Celigi, Gunung Perahu, Gunung Cerepung,

2. Sejarah Dinas Pendapatan Provinsi Lampung

Pada awalnya Dinas Pendapatan Provinsi Lampung bernama “Bagian Pajak/ Penghasilan Daerah Tingkat I Lampung. Waktu pembentukannya bersamaan dengan dibentuknya Provinsi Daerah Tingkat I Lampung pada bulan Maret tahun 1964. Pada tahun 1968

Bagian Pajak/Penghasilan Daerah Tk.I Lampung statusnya ditingkatkan menjadi “Biro” Penghasila Daerah Tingkat I Lampung. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur No. G/193/VIII/TH/1969, Biro Penghasilan Daerah Tk.I Lampung dihapus dan diubah menjadi Bagian Penghasilan Daerah yang secara struktural menjadi bagian dari Biro Keuangan Sekretariat Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung.

Dengan Surat Keputusan Gubernur No. Des/0254/B.VII/HK/1991, maka dibentuklah “Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung”. Selanjutnya, dengan Surat Keputusan Gubernur No. G/163/DP/HK/1972, tanggal 9 November 1972, maka dibentuklah Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung sebagai Dinas Daerah Tingkat I yang berdiri otonom dengan nama Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur No. G/102/B.II/HK/80 tanggal 21 Mei 1980 nama Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung diubah menjadi “Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung”. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. KUPD. 7/7/39-26 tanggal 31 Maret 1978 yang kemudian diralat dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. KUPD. 7/14/23 tanggal 24 Juni 1978, no mentri atur susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi di seluruh Indonesia menjadi seragam.

Untuk Provinsi Lampung nomer klatur Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung No. : 14 Tahun 1976.

Sejalan dengan diberlakukannya Otonomi Daerah, yaitu dengan dikeluarkannya UU No.22 Tahun 1999 dan UU No.25 Tahun 1999, maka pada tahun 2000 Pemerintah Daerah melakukan penataan terhadap Organisasi dan Tata Kerja Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 17 tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung dan Keputusan Gubernur Lampung No.: 61 Tahun 2001 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Provinsi Lampung, maka nomen klatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan berubah dari semula bernama Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung menjadi Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.

Kemudian sejalan dengan dikeluarkannya UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004, yang ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka pada tahun 2007 Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Daerah Lampung Nomo 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung; Bagian XVIII.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung, maka pada tahun 2010 Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Lampung mengalami perubahan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 Bagian VIII.⁶⁷

a. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Provinsi Lampung

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung; Bagian ke XVIII tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah; disebutkan:

- 1) Dinas Pendapatan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah provinsi di bidang pendapatan berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Dinas Pendapatan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a) Perumusan kebijakan, pengaturan, perencanaan, dan penetapan standar/pedoman;

⁶⁷Sumber : Sekretariat “Dinas Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung” 22 Mei 2019

b) Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan, dan Koordinasi
dan

c) Pelayanan administratif.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi tersebut maka Dinas Pendapatan Provinsi Lampung adalah merupakan unsur Pemerintah Provinsi yang antara lain diberi kewenangan sebagai pengelola pungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sekaligus sebagai Koordinator dibidang Pendapatan Daerah. Susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pajak;
- d. Bidang Retribusi dan Penerimaan Lain-lain;
- e. Bidang Pembinaan dan Pengawasan;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pada lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Lampung terdiri dari 5 (lima) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yaitu UPTD Wilayah I Bandar Lampung, UPTD Wilayah II Metro, UPTD Wilayah III Gunung Sugih, UPTD Wilayah IV Kotabumi dan UPTD Wilayah V Pringsewu.

b. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Dan Kebijakan Dinas Pendapatan Provinsi Lampung Tahun 2010-2014

1) Visi Pemerintah Provinsi Lampung

Visi yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2010 – 2014 adalah : “Lampung unggul dan berdaya saing berbasis Ekonomi Kerakyatan”.

2) Visi Dinas Pendapatan Provinsi Lampung

Mengacu kepada Visi Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2010 – 2014, maka Visi Dinas Pendapatan Provinsi Lampung tahun 2010 – 2014 adalah : “Pengelola pendapatan daerah yang profesional dan bertanggung jawab”.

3) Misi Dinas Pendapatan Provinsi Lampung

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, Dinas Pendapatan Provinsi Lampung merumuskan 3 (tiga) Misi Dinas Pendapatan Provinsi Lampung, yaitu :

- a) Memberikan pelayanan yang berkualitas dan berkuantitas maksimum kepada masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana yang efektif.
- b) Mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya dan teknologi secara efisien, efektif serta berkelanjutan dalam pengelolaan pendapatan daerah.

- c) Melaksanakan koordinasi yang optimal dalam menciptakan sinergisitas pengelolaan pendapatan daerah.
- 4) Tujuan, Sasaran, dan Kebijakan Dinas Pendapatan Provinsi Lampung

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pendapatan Provinsi Lampung, maka ditetapkan Tujuan, Sasaran, dan Kebijakan sebagai berikut

Tujuan :

- a) Peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat dalam proses pengelolaan Pendapatan Daerah.
- b) Tersedianya teknologi dan aparatur pengelola pendapatan daerah yang profesional.
- c) Peningkatan sinergisitas pengelolaan pendapatan daerah.

Sasaran :

- a) Peningkatan pelayanan dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dari tahun sebelumnya.
- b) Peningkatan sumber daya teknologi dan aparatur dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dari tahun tahun sebelumnya.
- c) Meningkatkan sinergisitas pengelolaan pendapatan daerah

Kebijakan :

- a) Penyediaan sarana dan prasarana yang optimal untuk mendukung produktifitas pendapatan daerah dan pelayanan.
- b) Penyediaan perangkat hukum yang taat azas dalam proses pengelolaan pendapatan daerah dan pelayanan
- c) Penyediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam proses pengelolaan pendapatan daerah.
- d) Pemanfaatan teknologi informasi yang optimal untuk mendukung produktifitas pendapatan daerah dan pelayanan.
- e) Pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/ Kota, dan Pemerintah Daerah Lainnya dalam rangka menciptakan sinergisitas pengelolaan pendapatan daerah.

Mencermati berbagai hal di atas, Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung menjelaskan bahwa strategi kebijakan pengelolaan pendapatan di Provinsi Lampung diarahkan pada :

- (1) Evaluasi/ penyesuaian, penyusunan, serta sosialisasi produk-produk hukum pendapatan daerah sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) Revitalisasi peran dan fungsi kelembagaan khususnya UPTD Pajak di lingkup Dispenda Provinsi Lampung.

- (3) Peningkatan sarana dan prasarana Kantor Bersama Samsat eksisting dalam upaya dalam memberikan pelayanan yang memuaskan kepada para wajib pajak kendaraan bermotor.
- (4) Peningkatan akses pelayanan kepada para wajib pajak kendaraan bermotor melalui samsat Link dan pembentukan kantor-kantor Samsat Pembantu pada lokasi-lokasi strategis maupun pengembangan keberadaan Samsat Keliling.
- (5) Peningkatan kapasitas aparatur pengelola Pajak Daerah dalam rangka peningkatan pelayanan dan peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pajak Daerah.
- (6) Optimalisasi proses-proses inspeksi dan pengujian kepatuhan pajak dalam rangka peningkatan pendapatan daerah khususnya dari sektor pajak daerah.
- (7) Rekonsiliasi data terkait dengan optimalisasi pengelolaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, serta lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, termasuk penyusunan Dana Bagi Hasil baik dari Pemerintah Pusat maupun kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota.
- (8) Optimalisasi fungsi-fungsi pengawasan dan pembinaan baik dalam lingkup internal maupun eksternal terkait pengelolaan pendapatan daerah pada bidang administrasi, keuangan, dan kelembagaan/ personal.

- (9) Optimalisasi koordinasi dalam proses pengelolaan pendapatan daerah baik dalam lingkup internal maupun eksternal.
- (10) Upaya untuk menggali kontribusi dari perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Provinsi Lampung dalam rangka peningkatan PAD

B. Hasil Penelitian

Penelitian ini menganalisis kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung. Penelitian menggunakan data dengan rentang waktu (periode) dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Alat pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah perangkat lunak (software) computer SPSS dengan metode analisis regresi linier sederhana dan uji asumsi klasik. Untuk hasil penelitian dapat dilihat pada perkembangan secara umum dari pajak Hotel dan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung, adapun gambarannya dapat dilihat sebagai berikut:

1. Hotel

Pajak Hotel

Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1, pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Pengertian hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, pe-sangrahan, rumah penginapan

dan sejenisnya serta rumah kos yang jumlah kamar lebih dari 10 kamar. Pengertian lain hotel adalah suatu bangunan lambing perusahaan atau badan usaha akomodasi yang menyediakan jasa penginapan, pe-nyedia makanan dan minuman serta fasilitas jasa lainnya dimana semua layanan itu diperuntukkan bagi masyarakat umum baik mereka yang bermalam di hotel tersebut atau pun mereka yang hanya menggunakan fasilitas tertentu yang dimiliki hotel.⁶⁸

Tabel. 6
Nama-Nama Wajib Pajak Hotel / Penginapan di Kota Bandar Lampung

NO	UPT	NAMA WAJIB PAJAK	ALAMAT
1	Enggal	Hotel Andalas	Jl. Raden Intan
2		Hotel Grande	Jl. Raden Intan
3		Hotel Kurnia Perdana	Jl. Raden Intan
4		Hotel Kurnia Ii	Jl. Raden Intan
5		Hotel Arinas	Jl. Raden Intan
6		Hotel Grand Anugrah	Jl. Raden Intan
7		Hotel Andalas Permai	Jl. Raden Intan
8		Hotel Astoria	Jl. Raden Intan
9		Hotel Enggal	Jl. Raden Intan
10		Hotel Amalia	Jl. Raden Intan
11		Guess House Palapa	Jl. Diponogoro
12		Pondok Mc 17	Jl. Raden Intan
13		Pelangi Residence	Jl. Mataram
14		Hotel Hartono	Jl. Terusan Juanda
15		Hotel Rarem	Jl. Way Rarem
16		Hotel Pelangi	Jl. Tulang Bawang
17		Hotel Horison	Jl. Ra. Kartini No.88
18		Hotel Batika	Jl. Jendral Sudirman
19		Hotel Shiz Prime	Jl. A. Yani No 21
20		Wisma Sudirman	Jl. Sudirman No 132
21		Hotel Arnes	Jl. Cut Nyak Dien
22		Hotel Ria	Jl. Ra Kartini No. 79
23		Hotel Gading	Jl. Ra . Kartini
23		Hotel Parahyangan	Jl. T. Umar
25		Hotel Mini I	Jl. Ra Kartini

⁶⁸ Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1

26		Hotel Mulya Indah	Jl. Durian
27	Tanjung Karang Pusat	Hotel Anugerah	Jl. A. Yani
28		Pondok 19	Jl. Ra Kartini
29		Wisma De Green	Jl. Jendral Sudirman
30		Penginapan Pondok Palapa	Jl. Emir M. Noor
31		Hotel Pop	Jl. Wr. Monginsidi
32		Grand Citihub Hotel Kartini	Jl. Ra. Kartini
33		Wisma Narita	Jl. Jendral Suprpto
34	Tanjung Karang Barat	Hotel Herline	Jl. R. Imbakusuma
35		Rumah Kost Bambu Kuning	Jl. Imam Bonjol
36		Hotel Puncak Mas	Jl. Imbakusuma
37		Hotel Bukit Randu	Jl. Kamboja No.12
38	Tanjung Karang Timur	Grand Kurnia Hostel	Jl. Hayam Wuruk
39		Kutilang Syariah	Jl. Kutilang
40		Wisma Chandra	Jl Pemuda
41		Rumah Kost Kemala	Jl. Gatot Subroto
42		Hotel Puri Intan	Jl. Soekarno Hatta
43		Hotel Kridawisata	Jl. Urip Sumoharjo
44		Griya Mentari	Jl. Ridwan Rais
45		24 Hour Guest House	Jl. Hayam Wuruk
46		Hotel Griya Gatsu 63	Jl. Gatot Subroto
47	Kedamaian	Omah Akas	Jl. Pulau Sebuku No. 9
48		Kosotel Hostel	Jl. P. Antasari No 15
49		Penginapan Divka	Jl. P. Antasari No 114
50		Kost-Kost Hayam Wuruk	Jl. Hayam Wuruk
51		Kost-Kost Pondok Hijau	Jl. Gatot Subroto
52		Wisma Amandari	Jl. Hayam Wuruk
53		Ratu Ayu Homestay	Jl. Urip Sumoharjo No. 214
54		Bambue In 2 Wisma	Jl. P. Antasari
55		Rumah Kost Twins	Jl. P. Morotai
56	Rajabasa	Wisma Bandar Lampung	Jl. Za. Pagar Alam
57	Kedaton	Hotel Sari Damai	Jl. Teuku Umar No. 1
58		Penginapan Azaziah	Jl. Teuku Umar Gg. Romeo

59		Hotel Sikampai	Jl. Urip Sumoharjo
60		Hotel Surya	Jl. Urip Sumoharjo
61		Hotel Jokio	Jl. Urip Sumoharjo
62	Way Halim	Hotel Raflesia	Jl. Urip Sumoharjo
63		Harion Hostel	Jl. Batam No.5
64		Asoka Luxury Hotel	Jl. Morotai No.16
65		Bamboe Homestay	Jl. Griya Utama No.57
66		Rumah Kost Langgeng	Jl. Pulau Buru No 47
67		Triple A Homestay	Jl. Urip Sumoharjo No. 3a
68		Triple B Homestay	Jl. Urip Sumoharjo No. 88 B
69		Bait Sa'da Guest House	Jl. Tomat No. 55
70	Kemiling	Hotel Bella	Jl. Imam Bonjol
71	Sukabumi	Hotel Nusantara	Jl. Soekarno Hatta
72	Panjang	Hotel Swadek	Jl. Dawe
73		Penginapan Angkasa	Jl. Soekarno Hatta
74		Hotel Rachmat	Jl. Yos Sudarso
75	Teluk Betung Timur	Hotel Tirtayasa	Jl. Yos Sudarso
76		Hotel Sahid Krakatau	Jl. Yos Sudarso
77		Hotel Pasifik	Jl. Gatot Subroto No. 137
78	Bumi Waras	Hotel Dwipa Wisata	Jl. Gatot Subroto No. 18
79		Hotel Novotel	Jl. Gatot Subroto
80		Santigi Kostel	Jl. Gatot Subroto No. 137
81		Aston Lampung City Hotel	Jl. Gatot Subroto No. 18
82	Teluk Betung Selatan	Hotel Sriwijaya	Jl. Ikan Kakap
83		Penginapan Jazz Guest House	Jl. Laks. Malahayati
84		Hotel Yunna	Jl. Ikan Hiu No. 1
85		Hotel Seraton	Jl. Wr Mongonsidi
86		Hotel Marcopolo	Jl. Dr. Susilo
87		Hotel Widara Asri	Jl. Kh. Dahlan
88		Hotel Gemini Indah	Jl. Kh. Dahlan
89		Hotel Lusi	Jl. Diponegoro
90		Hotel Lampung Inn	Jl. Wr. Mongonsidi
91	Teluk Betung Utara	Pondok Wisata Rasuna Said	Jl. Rasuna Said
92		Penginapan Mess	Jl. Diponegoro

		Diponegoro	
93		Penginapan Serasi	Jl. Wr. Mongonsidi
94		Hotel Emersia	Jl. Wr. Mongonsidi
95		Toro Guest House	Jl. Wr. Mongonsidi
96		Hotel Grand Praba	Jl. Wr. Mongonsidi
97		Cut Mutia Residence	Jl. Cut Mutia
98		Swiss Belhotel	Jl. Rasuna Said No. 18
99		Wisma Andalas Asri	Jl. Basuki Rahmat
100	Teuk Betung Barat	Taman Wisata Wira Garden	Jl. Wa. Rahman
101	Labuhan Ratu	Tanggo Hostel	Jl. Sultan Agung
102	Sukarame	Puri Kesuma Yuda	Jl. P.Seribu No. 50

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, 2019

Tabel. 6 berjumlah 102 unit jumlah wajib pajak hotel tersebut dapat berubah sewaktu waktu apabila hotel/penginapan tidak beroperasi atau tutup usaha sementara. Hotel yang berdiri baik kelas bintang maupun non berbintang senantiasa dilandasi oleh peluang pasar yang ada di daerah dimana hotel didirikan atau permintaan pasar penginapan. Semakin banyak wisatawan masuk ke daerah maka akan memperbesar potensi yang dapat dipungut dari kegiatan pada sektor perhotelan.

Bertambahnya jumlah hotel yang ada di kota Bandar Lampung salah satunya mempengaruhi penetapan target untuk pajak hotel oleh pemerintah daerah, jumlah hotel di Kota Bandar Lampung dan tingkat hunian hotel/penginapan dapat memberikan kontribusi penerimaan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Tabel.7
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kota
Bandar Lampung Tahun 2013-2017

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI
1	2013	Rp. 15.000.000.160,00	Rp. 12.335.668.039,50
2	2014	Rp. 16.000.000.000,00	Rp. 16.020.176.880,00
3	2015	Rp. 20.000.000.000,00	Rp. 15.243.130.946,00
4	2016	Rp. 21.000.000.000,00	Rp. 18.586.994.392,00
5	2017	Rp. 22.000.000.000,00	Rp. 20.726.154.355,00

*Sumber : Badan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Kota
Bandar Lampung, 2019*

Berdasarkan **Tabel 7** Pajak hotel dari 2013-2017 menunjukkan penerimaan yang cukup memiliki peningkatan dari tahun 2013 sebesar Rp.12.335.668.039,50 pada tahun 2017 menjadi Rp. 20.726.154.355⁶⁹

2. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah pungutan yang dilakukan berdasarkan pendapatan daerah. Untuk mengetahui sejauh mana pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mengelola sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut, dan perkembangan didalam menunjang pelaksanaan pembangunan serta jalannya roda pemerintahan di Kota Bandar Lampung. Berikut ini penulis menyajikan data tentang perkembangan realisasi Pendapatan Asli Daerah sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.

⁶⁹ Sumber : “Badan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung”, 22 Mei 2019

Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa PAD Kota Bandar Lampung dalam lima tahun terakhir mengalami perubahan yang beragam. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Tabel . 8
Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung
Tahun 2013-2017

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI
1	2013	Rp. 418.111.740.815,52	Rp. 367.280.104.011,88
2	2014	Rp. 495.200.463.931,26	Rp. 394.646.889.446,59
3	2015	Rp. 769.108.142.606,24	Rp. 397.547.326.856,39
4	2016	Rp. 757.745.187.987,05	Rp. 483.379.398.034,84
5	2017	Rp. 994.795.696.600,00	Rp. 612.809.680.623,87

Sumber : Badan Pendapatan dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung.2019

Berdasarkan **Tabel 8**, dalam kurun waktu lima tahun terakhir yakni tahun 2013 sampai tahun 2017, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung mengalami kenaikan tiap tahunnya. Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung yang terus menerus di tahunnya disebabkan karena telah efektifnya realisasi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandar Lampung yaitu program intensifikasi dan ekstentifikasi pajak yaitu penarikan pajak sudah optimal. Hal ini dapat dilihat dari tabel diatas dimana pada tahun 2013 besarnya realisasi pendapatan asli daerah adalah Rp.

367.280.104.011.88 dan terus meningkat hingga tahun 2017 yang menjadi Rp. 612.809.680.623.87.⁷⁰

C. Analisis Data

1. Analisis Uji Efektivitas Pajak Hotel

Pengertian lain efektifitas adalah perbandingan antara realisasi suatu pendapatan dengan target yang ditetapkan juga bisa dikatakan perbandingan antara outcome dengan output. Outcome adalah tujuan/target yang ditetapkan.⁷¹ Efektivitas dapat pula diartikan sebagai suatu kondisi atau keadaan dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana yang digunakan, serta kemampuan yang dimiliki adalah tepat, sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan.⁷²

Kemampuan daerah Kota Bandar Lampung dalam merealisasikan penerimaan pajak hotel dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi sesungguhnya dapat ditunjukkan melalui rasio efektifitas. Perhitungan efektifitas pajak hotel menggunakan rumus dan perhitungan sebagai berikut⁷³:

Analisis Tingkat Efektifitas Kontribusi Pajak Hotel Kota Bandar Lampung Tahun 2013-2017. Efektifitas Pajak Hotel yaitu perbandingan antara penerimaan Pajak Hotel dengan target

⁷⁰ Sumber: “Badan Pendapatan dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung”, 22 Mei 2019.

⁷¹ Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: Salemba Empat, 2004), h.75

⁷² Martoyo Susilo, *Sistem Pengadilan Manajemen*, (Yogyakarta: Salemba Empat 2008), hal. 105

⁷³ Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah*, (Jakarta: Salemba empat, 2013), h.34

penerimaan. Pajak Hotel untuk mengetahui tingkat efektifitas dari pelaksanaan penerimaan Pajak Hotel, dengan membandingkan target yang ditetapkan dengan hasil realisasinya, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Target Realisasi Pajak Hotel}} \times 100\%$$

Dimana :

X = Realisasi Penerimaan Pajak Hotel

Y = Target Penerimaan Pajak Hotel

Tabel.9
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kota
Bandar Lampung Tahun 2013-2017

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI
1	2013	Rp. 15.000.000.160,00	Rp. 12.335.668.039,50
2	2014	Rp. 16.000.000.000,00	Rp. 16.020.176.880,00
3	2015	Rp. 20.000.000.000,00	Rp. 15.243.130.946,00
4	2016	Rp. 21.000.000.000,00	Rp. 18.586.994.392,00
5	2017	Rp. 22.000.000.000,00	Rp. 20.726.154.355,00

Sumber : Badan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung, 2019

Berdasarkan rumus diatas, maka perhitungan efektifitas pajak hotel sebagai berikut :

$$100\% = \frac{12.335.668.039,50}{15.000.000.160,00} \times 100\% = 8,22 \%$$

$$\frac{16.020.176.880,00}{16.000.000.000,00} = 1,00\%$$

Tahun 2014 = 1,00% X

$$\frac{15.243.130.946,00}{20.000.000.000,00} = 7,62\%$$

Tahun 2015 = 7,62% X

$$\frac{18.586.994.392,00}{21.000.000.000,00} = 8,85\%$$

Tahun 2016 = 8,85% X

$$\frac{20.726.154.355,00}{22.000.000.000,00} = 9,42\%$$

Tahun 2017 = 9,42 % X

Tabel. 10
Efektifitas Penerimaan Pajak Hotel Kota Bandar Lampung

NO	TAHUN	HOTEL		EFEKTIFITAS	NILAI EFEKTIFITAS KONTRIBUSI
		REALISASI	TARGET		
1	2013	12.335,668.039,50	15.000,000,160,00	8,22 %	0,00%-10% = Sangat Kurang
2	2014	16.020,176,880,00	16.000,000,000,00	1,00 %	10,10%-20%= Kurang
3	2015	15.243,130,946,00	20.000,000,000,00	7,62 %	20,10%-30%= Sedang
4	2016	18.586,994,392,00	21.000,000,000,00	8,85 %	40,10%-50%= Baik
5	2017	20.726,154,355,00	22.000,000,000,00	9,42 %	>50%= Sangat Baik

*Sumber: Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah data diolah
2019*

Dari hasil perhitungan menggunakan rumus efektivitas kontribusi ditunjukkan pada **tabel 10**, bahwa pada tahun 2013 efektivitas pajak hotel sebesar 8,22%, pada 2014 sebesar 1,00%, pada tahun 2015 sebesar 7,62%, pada tahun 2016 sebesar 8,85% dan pada tahun 2017 sebesar 9,42%. Pencapaian presentase efektivitas penerimaan pemungutan pajak hotel dari tahun 2013-2017 mengalami perkembangan yang berfluktuasi. Artinya dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajak hotel dapat dikatakan sangat kurang efektif, karena nilai yang didapat dari hasil perhitungan efektivitas kontribusi masuk dalam nilai di antara 0,00% - 10% atau kriteria sangat kurang efektif dan pencapaian efektivitas untuk realisasinya masih belum dapat mencapai targetnya dimana presentase masih menunjukkan dibawah 100%.

2. Analisis Kontribusi Pajak Hotel

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif, yakni alat analisis yang menggunakan uji efektivitas dan uji kontribusi pajak untuk mengetahui sejauh mana pengaruh antara satu variabel dengan variabel lainnya. hasil pengolahan data tersebut kemudian akan dilakukan pembahasan yang lebih mendalam. Hasil penelitian menggambarkan tentang data hasil yang diperoleh termasuk yakni data pajak hotel, dan Pendapatan Asli daerah (PAD) Kota Bandar Lampung, dari tahun 2013 sampai tahun 2017 dengan hasil diolah.

Analisis kontribusi merupakan analisis untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangannya dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Hasil analisi kontribusi dapat diketahui dengan rumus berikut⁷⁴:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Pajak Hotel}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100 \%$$

Berdasarkan rumus diatas maka perhitungan kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \frac{12.335.668.039,50}{367.280.104.011,88} \times 100\% = 0,33\% \\ & \frac{16.020.176.880,00}{394.646.889.446,59} \times 100\% = 0,40\% \\ & \frac{15.243.130.946,00}{397.547.326.856,39} \times 100\% = 0,38\% \\ & \frac{18.586.994.392,00}{483.379.398.034,84} \times 100\% = 0,38\% \end{aligned}$$

⁷⁴ Abdul Halim, *Akutansi Keuangan Daerah*, (Jakarta: Salemba empat, 2013), h.34

$$100\% = \frac{20.726.154.355,00}{612.809.680.623,87} \times X$$

$$100\% = 0,33\%$$

Tabel.8
Hasil Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD

NO	TAHUN	REALISASI HOTEL	TOTAL PAD	KONTRIBUSI
1	2013	12.335,668,039,50	367.280,104,011,88	0,33%
2	2014	16.020,176,880,00	394.646,889,446,59	0,40%
3	2015	15.243,130,946,00	397.547,326,856,39	0,38%
4	2016	18.586,994,392,00	483.379,398,034,84	0,38%
5	2017	20.726,154,355,00	612.809,680,623,87	0,33%
n/rata-rata				0,40%

Sumber: Data hasil olah 2019

Dari hasil perhitungan menggunakan rumus kontribusi ditunjukkan pada **Tabel 9**, bahwa pada tahun 2013 kontribusi pajak hotel sebesar 0,33% pada 2014 sebesar 0,40% pada tahun 2015 sebesar 0,38%, pada tahun 2016 sebesar 0,38% dan pada tahun 2017 sebesar 0,33%. Pencapaian presentase kontribusi penerimaan pemungutan pajak hotel dari tahun 2013-2017 mengalami perkembangan yang berfluktuasi. Artinya dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajak hotel dapat dikatakan sangat kurang efektif, karena nilai yang didapat dari hasil perhitungan efektivitas kontribusi masuk dalam nilai di antara 0,00% - 10% atau kriteria sangat kurang efektif dan pencapaian efektivitas untuk

realisasinya masih belum dapat mencapai targetnya dimana presentase masih menunjukkan dibawah 100%.

D. Pembahasan

1. Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung dikatakan sebagai kota persinggahan (transit) dikarenakan jika melihat data bisnis akomodasi yaitu hotel dan penginapan, yang ada di Kota Bandar Lampung, jumlahnya cukup banyak, oleh karena itu pemerintah daerah harus mampu memaksimalkan dari sektor industri perhotelan dalam rangka meningkatkan PAD Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan hasil analisis efektivitas kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kota Bandar Lampung, bahwa kontribusi pajak hotel dapat dikatakan sangat kurang efektif, karena nilai yang didapat dari hasil perhitungan efektivitas kontribusi masuk dalam nilai di antara 0,00% - 10% atau kriteria sangat kurang efektif dan pencapaian efektivitas untuk realisasinya masih belum dapat mencapai targetnya dimana presentasenya masih menunjukkan dibawah 100%.

Berdasarkan hasil analisis kontribusi pajak hotel, Pencapaian presentase kontribusi penerimaan pemungutan pajak hotel dari tahun 2013-2017 mengalami perkembangan yang berfluktuasi. Pajak hotel memberikan kontribusi nilai/rata-rata sebesar 0,40% terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung dengan kriteria 0,00%-10% yang berarti kontribusinya sangat kurang baik hal itu terjadi karena :

- a. Kurangnya kesadaran wajib pajak hotel untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak sehingga pendapatan pajak hotel menurun dan tidak mencapai target.
- b. Kurangnya sosialisasi tentang pentingnya pungutan pajak hotel.
- c. Sulitnya mengakses data dari penerimaan pendapatan hotel.

Hal tersebut sesuai dengan hipotesis yang diajukan yaitu pajak hotel memiliki kontribusi terhadap pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung. Hasil analisis ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Agriani Lombogia Di Kabupaten Minahasa Selatan bahwa terjadi signifikasi kontribusi pajak hotel terhadap PAD di Kabupaten Minahasa Selatan walaupun signifikasi kontribusinya menunjukkan bahwa kontribusi pajak hotel dalam kurun waktu 2012-2015 tidak selalu meningkat atau mengalami fluktuasi. Walaupun kontribusi pajak hotel tidak begitu besar tetapi pajak hotel memberikan kontribusi terhadap PAD.

2. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Pajak Hotel di Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam pandangan Perspektif Ekonomi Islam melihat dari tata cara pemungutan pengambilan pajak yang dipaparkan dalam wawancara bersama Bapak Drs. Yanwardi, M.M di Dinas Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah. Pajak hotel diberlakukan dengan sistem pungutan yang sifatnya memaksa terdapat dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sehingga hal ini dapat kita pandang dalam perspektif ekonomi Islam sangat jauh berbeda mengenai tata cara pemungutan pajak yang benar dalam Islam sebagaimana yang telah di paparkan di dalam teori pembahasan di bab II, dalam sistem ekonomi Islam ada beberapa unsur dasar prinsip-prinsip penerimaan dan pemungutan negara menurut sistem ekonomi Islam, yaitu harus memenuhi Unsur :

- 6) Subjeknya kaum mukmin yang kaya saja, dan tidak termasuk non muslim
- 7) Tujuannya hanya untuk membiayai kaum muslim saja.
- 8) Diberlakukan hanya karena adanya kondisi darurat

- 9) Harus adanya nash (Al-Quran dan Hadis) yang memerintahkan setiap sumber pendapatan dan pemungutan.
- 10) Adanya pemisah sumber penerimaan kaum muslim dan non muslim.
- 11) Sistem pemungutan pajak harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan golongan makmur yang mempunyai kelebihan saja yang memikul beban utama (Pajak).
- 12) Adanya tuntutan kemaslahatan umum.

Maka dapat dikatakan cara atau sistem yang digunakan dalam pemungutan dan pembayaran pajak hotel di Kota Bandar Lampung belum memenuhi prinsip-prinsip pemungutan dan penerimaan pajak dalam pandangan perspektif ekonomi Islam. Disebabkan Pendapatan Asli Daerah masih memberikan beban kewajiban pajak kepada semua orang yang wajib membayar pajak, tidak adanya pemisah antara wajib pajak non muslim dan muslim, dan pembayaran pajak terus dilakukan semasa tempat usaha itu masih beroperasi. Kemudian jika wajib pajak terhutang melewati batas pembayaran maka dinas perpajakan memberikan surat pemberitahuan hutang pajak dan denda kepada wajib pajak yang telat membayar dari jangka waktu yang telah ditentukan.

Tetapi ada beberapa sistem yang sudah dirasa cukup baik dan mengarah kepada kemaslahatan umat yaitu Sistem pemerintahan di kota bandar lampung terkait dengan pemungutan pajak hotel sudah

menggunakan beberapa prinsip ekonomi islam seperti hasil pajak digunakan untuk kepentingan umat, pembayaran pajak dipungut sesuai dengan melihat objek pajaknya secara adil, amanah dan jujur, prinsip islam yaitu prinsip keadilan, keseimbangan, pemerataan, kesejahteraan dan ekonomi, kemudian peraturan daerah tentang pajak telah dibuat dengan adil dan memenuhi empat syarat dan sebagian hasil penerimaan pajak daerah dialokasikan untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dapat dirasakan masyarakat luas sehingga tercapai kesejahteraan umat.

Dengan diberlakukannya kebijakan pemungutan pajak daerah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan. Hal ini juga berdampak sangat besar bagi pemerinah Kota Bandar Lampung tidak terkecuali untuk masyarakat guna membiayai penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah Kota Bandar Lampung.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan Hasil Penelitian Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2013-2017 (Studi Pada Dinas Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah), dapat disimpulkan bahwa hasil analisis uji efektivitas dan hasil analisis kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kota Bandar Lampung, uji efektivitas kontribusi pajak hotel dapat dikatakan sangat kurang efektif, Pencapaian presentase kontribusi penerimaan pemungutan pajak hotel dari tahun 2013-2017 mengalami perkembangan yang berfluktuasi. Pajak hotel memberikan kontribusi nilai/rata-rata sebesar 0,40% kemudian nilai yang didapat dari hasil perhitungan efektivitas kontribusi masuk dalam nilai di antara 0,00% - 10% atau kriteria sangat kurang efektif dan pencapaian efektivitas untuk realisasinya masih belum dapat mencapai targetnya dimana persentasenya masih menunjukkan dibawah 100%.

2. Dalam Pandangan perspektif ekonomi Islam Badan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung belum sepenuhnya menggunakan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam tata cara pemungutan pajak tetapi dalam kebijakannya sudah mengarah kepada kemaslahatan umat seperti prinsip keadilan, keseimbangan, pemerataan, kesejahteraan ekonomi, yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dapat dirasakan masyarakat luas sehingga tercapai kesejahteraan umat.

B. SARAN

Beberapa saran penelitian untuk berikutnya dapat diberikan peneliti antara lain :

1. Bagi pemerintah untuk dapat serta berupaya menggunakan sistem ekonomi Islam dalam tata cara pemungutan pajak. Berusaha lebih untuk meningkatkan penerimaan Pajak Hotel dengan cara memperketat sanksi kepada wajib pajak yang tidak mau membayar pajak, dan memperbaiki sistem administrasi yang ada, Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi secara berkala, dan juga memberikan surat teguran kepada wajib pajak/pemilik atau perusahaan hotel yang belum melunasi kewajibannya.
2. Bagi penelitian-penelitian lainnya yang ingin melakukan penelitian, dapat melakukan tindak lanjut penelitian khususnya menambah variabel yang dapat mempengaruhi PAD di Kota

Bandar Lampung seperti pajak restoran, hiburan, parkir dan reklame.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Ketiga*, Jakarta : Salemba Empat, 2007.

Abdul Halim, *Akutansi Keuangan Daerah*, Jakarta: Salemba empat, 2013.

Abdul Halim, *Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Unit Penerbit Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004

A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2012.

Brotodihadjo R. Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: PT.Eresco, 2001.

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* Bandung: Pt. Sygma Examedia Arkanleema, 2013.

Departemen Agama RI, *Mushaf Al-quran Terjemah*, Depok: Al-Huda, 2013.

Djoko Prakoso, *Pajak dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Gustami, *Pajak Menurut Syariah*, edisi Revisi, jakarta:rajawali pers: 2011.

Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta:Grasindo, 2012.

Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta: Erlangga, 2005.

Mardiasmo, *Perpajakan EdisiRevisi*, Yogyakarta: Andi Publisher, 2013.

Mardiasmo, *Perpajakan*, Yogyakarta: Andi Publisher, 2009.

Mardiasmo, *Perpajakan*, Yogyakarta: Andi Publisher, 2011.

Nugroho Budiyoono, *Pengantar Statistik Ekonomi dan Perusahaan*, Yogyakarta: UII Press, 2006.

Nurlan Darise, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta : Indeks, 2008.

Panca Kurniawan, dan Agus Purwanto “*Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*” Malang: Anggota IKAPI Jatim, 2006.

Poerwardarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2000.

Prof.Dr.Sugiono, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: Alfabeta, 2016.

Ridwan. *Metode Dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada aktivitas ekonomi*, Jakarta : PT. RajaGrafindo, 2015.

Siahaan, Marihot, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: PT.Grafindo Persada, 2005.

Siahaan, Marihot, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: AlfaBeta, 2014.

Sutrisno Hadi. *Metodologi Research*, Yogyakarta: UGM, 2005.

Thomas Sumarsan , *Perpajakan Indonesia*, Yogyakarta: Indeks, 2013.

Undang-undang No. 33 Tahun 2004, Bab V Pasal 6 tentang Pendapatan Asli Daerah

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pada Pajak Provinsi dan tarif Pajaknya

Undang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang Dasar Pengenaan Pajak Daerah

Sumber on-line :

Berita Kota Bandar Lampung, “*Sebagai Kawasan Strategis yang Mensejahterakan Masyarakat*” Bandar Lampung Creative City Forum.

Berita Resmi Kota Bandar Lampung Jadi Persinggahan Wisatawan.

Perkembangan Tingkat Hunian Kamar Desember, Provinsi Lampung Badan Pusat Statistik, 2017.

Jumlah Hotel di Kota Bandar Lampung, Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung, 2017.

Kajian Ekonomi Regional dan Keuangan Ekonomi Regional Provinsi Lampung Kajian Triwulanan Periode Mei 2017.

Jurnal :

Anita, Chandasari, Kontribusi Hotel dan Restoran terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* vol. 5 No 2. 2016.

Dewi Oktavina, *Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Dalam Rangka Otonomi Daerah Pendekatan Error Correction Model*, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol.10 No. 2, Desember 2012.

Hamida El Laila Eka Nur Jannah, Imam Suyadi, Hamidah Nayati Utami, Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah, *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* Vol. 10 No.1, 2016.

Nabila Suha Bahmidi, Herry Wahyudi, Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel Dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan, *Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis* Vol. 18 No.1, Maret 2018.

R. Agoes Kamaroellah, Analisis Kontribusi Penerimaan Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan, *Jurnal Ekonomika*, Vol. 4 No.1 Juni 2011.

Randy J.R.Walakandou, Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kota Manado, *Jurnal Emba* Vol.1 No.3 Juni 2013.

LAMPIRAN



Gambar.1 Penelitian Di Dinas Badan Pengelolaan Pajak Dan
Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung



Gambar. 2 Penelitian di Dinas Pariwisata Kota Bandar
Lampung

